

**PENGARUH JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN,
RETRIBUSI OBYEK WISATA, PAJAK HOTEL DAN
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Syarifah Naili Rahmi

No. Mahasiswa : 14312285

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**PENGARUH JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN, RETRIBUSI
OBYEK WISATA, PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama : Syarifah Naili Rahmi

No. Mahasiswa : 14312285

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

Pernyataan Bebas Plagiarisme

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis, diacu dalam naskah ini, dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 24 September 2018

Penulis,



(Syarifah Naili Rahmi)

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN, RETRIBUSI
OBYEK WISATA, PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

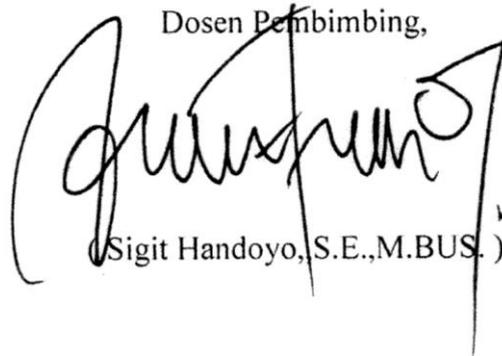
Nama : Syarifah Naili Rahmi

No. Mahasiswa : 14312285

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal : 4 Sept 2018

Dosen Pembimbing,



(Sigit Handoyo, S.E., M.BUS.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN, RETRIBUSI OBJEK WISATA,
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI
YOGYAKARTA**

Disusun Oleh : **SYARIFAH NAILI RAHMI**

Nomor Mahasiswa : **14312285**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 17 Oktober 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Sigit Handoyo, SE., M.Bus

Penguji : Isti Rahayu, Dra., M.Si, Ak, Cert, SAP



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ucap syukur Alhamdulillah, telah saya persembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang saya sayangi. Karya kecil ini saya persembahkan kepada :

1. Mama dan papa selaku orang tuaku.
2. Adik-adikku (Dik Fahri dan Dik Azza) tersayang.
3. Seluruh keluarga besar dari mama dan papa yang selalu memberikan semangat.

HALAMAN MOTTO

“Jangan melihat masa lalu dengan penyesalan,
Jangan melihat masa depan dengan ketakutan,
Lihatlah sekitar Anda dengan penuh kesadaran”

“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak.” – Aldus Huxley

KATA PENGANTAR

Bismillah...

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi).

Penulisan tugas akhir (skripsi) ini diajukan guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 (S1) pada jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Skripsi yang diajukan berjudul “PENGARUH JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN, RETRIBUSI OBYEK WISATA, PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI YOGYAKARTA”.

Dalam proses penyusunan dan penulisan tugas akhir (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan atau semangat dari berbagai pihak. Maka dari itu dalam kesempatan kecil ini penulis dengan senang hati menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Mama dan papa selaku orang tua, terima kasih atas segala doa yang telah kalian panjatkan.
2. Dik Fahri yang selalu memberikan dukungan dari jauh.
3. Dik Azza yang selalu memberikan hiburan dikala jenuh memikirkan skripsi.

4. Danang Setiawan, terima kasih telah menjadi partner terbaik dalam membantu dikala senang maupun susah, yang senantiasa memberikan semangat, senantiasa mendoakan, dan selalu menjadi moodbooster dikala sedang badmood atau berada pada posisi yang sulit. Ingat target kita ya... hehehe.
5. Keluarga besar (Mbah, Om, Tante, Budhe, Pakdhe, dan semua saudara sepupuku) yang telah memberikan semangat dan mendoakan.
6. Ibu Danang (Titik Purwanesti) yang selalu mengingatkan “gek ndang digarap ben do ndang kerjo..” “iya buk iya hehe”.
7. Bapak Sigit Handoyo,,S.E.,M.BUS. selaku dosen pembimbing yang senantiasa membimbing saya dengan penuh kesabaran, memberikan arahan, memberikan masukan, memberikan kritik serta ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi).
8. Bapak Fathul Wahid, ST.,M.Sc.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
9. Bapak Jaka Sriyana, SE.,M.Si.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
10. Bapak Mahmudi, SE.,M.Si.,Dr selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
11. Teman-teman terheboh (Nanda, Dina, Ninu, Ira, Adel, Bella) yang selalu memberi dukungan satu sama lain agar cepat lulus, wisauda, nikah hehe.

12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala dukungan dan doa yang kalian berikan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi).

Ini merupakan wujud syukur penulis terhadap semua pihak yang telah memberikan bantuan, doa, serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Apabila selama ini penulis mempunyai kesalahan ataupun kekhilafan, penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Demi perbaikan berikutnya kritik dan saran membangun akan penulis terima dengan ikhlas. Akhir kata, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya dan semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan kepada kita semua. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 September 2018

Penulis.

DAFTAR ISI

COVER	i
Cover Dalam	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Berita Acara Ujian Tugas Akhir/Skripsi	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Motto	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xv
Daftar Lampiran	xvi
Abstrak	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	15

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15
2.1.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16
2.1.3. Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	19
2.1.4. Pendapatan Pariwisata	21
2.1.5. Jumlah Kunjungan Wisatawan	23
2.1.6. Jenis dan Karakteristik Wisatawan	25
2.1.7. Retribusi Obyek Wisata	27
2.1.8. Pajak Hotel	28
2.1.9. Pajak Restoran	32
2.2. Penelitian Terdahulu	34
2.3. Kerangka Pemikiran	40
2.4. Perumusan Hipotesis	41
2.4.1. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Yogyakarta	41
2.4.2. Pengaruh Retribusi Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Yogyakarta	42
2.4.3. Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Yogyakarta	42
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis dan Sumber Data Penelitian	44
3.2. Penentuan Sampel	45
3.3. Variabel Penelitian	45
3.4. Teknik Analisis Data	46

3.4.1. Uji Data Deskriptif	46
3.4.2. Uji Asumsi Klasik	47
3.5. Uji Ketetapan Model	48
3.5.1. Uji F (Uji Simultan)	48
3.5.2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	49
3.5.3. Analisis Regresi Linear Berganda	50
3.5.4. Uji Hipotesis	51

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum dan Penelitian	52
4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data	53
4.2.1. Statistik Deskriptif	53
4.2.2. Uji Asumsi Klasik	55
4.2.3. Uji Ketetapan Model	60
4.2.4. Analisis Regresi Linear Berganda	62
4.2.5. Uji Hipotesis	64
4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembuktian Hipotesis)	66
4.3.1. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah	66
4.3.2. Pengaruh Retribusi Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah	68
4.3.3. Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah	72

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	75
5.2. Keterbatasan Penelitian	76
5.3. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan DIY	2
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	53
Tabel 4.2 Uji Normalitas	56
Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas	57
Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas	58
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi	59
Tabel 4.6 Uji F	61
Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinan (R^2)	62
Tabel 4.8 Analisis Linear Berganda	63
Tabel 4.9 Uji Signifikansi t	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Output SPSS	81
Lampiran II Data Penelitian Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	85
Lampiran III Laporan PAD Kabupaten Bantul 2013	86
Lampiran IV Laporan PAD Kabupaten Gunungkidul 2013	87
Lampiran V Laporan PAD Kabupaten Kulon Progo 2013	88
Lampiran VI Laporan PAD Kabupaten Sleman 2013	89
Lampiran VII Laporan PAD Kota Yogyakarta 2013	91
Lampiran VIII Laporan PAD Kabupaten Bantul 2014	92
Lampiran IX Laporan PAD Kabupaten Gunungkidul 2014	93
Lampiran X Laporan PAD Kota Yogyakarta 2014	94
Lampiran XI Laporan PAD Kabupaten Kulon Progo 2014	95
Lampiran XII Laporan PAD Kabupaten Sleman 2014	96
Lampiran XIII Laporan PAD Kabupaten Bantul 2015	97
Lampiran XIV Laporan PAD Kabupaten Gunungkidul 2015	101
Lampiran XV Laporan PAD Kota Yogyakarta 2015	102
Lampiran XVI Laporan PAD Kabupaten Kulon Progo 2015	104
Lampiran XVII Laporan PAD Kabupaten Sleman 2015	105
Lampiran XVIII Laporan PAD Kabupaten Bantul 2016	106
Lampiran XIX Laporan PAD Kota Yogyakarta 2016	107
Lampiran XX Laporan PAD Kabupaten Kulon Progo 2016	108
Lampiran XXI Laporan PAD Kabupaten Sleman 2016	109

Lampiran XXII Laporan PAD Kabupaten Gunungkidul 2016	110
Lampiran XXIII Laporan Perkembangan Pariwisata 2013-2016	
a. Kota Yogyakarta	111
b. Kabupaten Sleman	112
c. Kabupaten Bantul	113
d. Kabupaten Kulon Progo	114
e. Kabupaten Gunungkidul	115
Lampiran XXIV Retribusi Obyek Wisata 2013	116
Lampiran XXV Retribusi Obyek Wisata 2014	117
Lampiran XXVI Retribusi Obyek Wisata 2015	118
Lampiran XXVII Retribusi Obyek Wisata 2016	119
Lampiran XXVIII Surat Izin Dinas Kesbangpol	120
Lampiran XXIX Surat Izin Bappeda Kabupaten Bantul	122
Lampiran XXX Surat Tanda Terima Izin Penelitian Kota Yogyakarta	124
Lampiran XXXI Kartu Masuk Penelitian Pemda DIY	125
Lampiran XXXII Lembar Disposisi	126
Lampiran XXXIII Surat Izin Penelitian Universitas Islam Indonesia	127

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh kunjungan wisatawan, retribusi obyek wisata, pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di daerah Provinsi Yogyakarta. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Subyek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset dan Dinas Pariwisata Provinsi Yogyakarta. Obyeknya adalah jumlah kunjungan wisatawan, retribusi obyek wisata, pajak hotel dan restoran, serta pendapatan asli daerah. Populasi penelitian ini adalah seluruh pendapatan asli daerah di Provinsi Yogyakarta. Sampel penelitian ini yaitu realisasi pendapatan asli daerah di daerah Provinsi Yogyakarta periode 2013-2016. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini yaitu metode sampel total. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode analisis regresi linea berganda.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pengaruh hubungan jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah, retribusi obyek wisata tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak hotel dan restoran tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Yogyakarta.

Kata kunci : jumlah kunjungan wisatawan, retribusi obyek wisata, pajak hotel dan restoran, pendapatan asli daerah (PAD).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Provinsi Yogyakarta merupakan daerah yang sering dikunjungi oleh para wisatawan asing maupun domestik untuk berlibur. Provinsi Yogyakarta merupakan salah satu alternatif para wisatawan untuk berlibur karena Provinsi Yogyakarta dikenal sebagai daerah yang hidup dan terus berkembang. Perkembangan Provinsi Yogyakarta dari waktu ke waktu ini yang senantiasa memberikan suasana nyaman dan hidup bagi para pendatang maupun wisatawan, sehingga setiap wisatawan yang berlibur ke Provinsi Yogyakarta pasti akan rindu untuk kembali berlibur ke Daerah Istimewa Yogyakarta.

Disamping itu Provinsi Yogyakarta dikenal sebagai daerah wisata, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota pelajar, kota budaya, dan kota perjuangan. Yogyakarta disebut sebagai kota wisata karena terdapat berbagai macam obyek wisata yang terletak di Yogyakarta. Salah satu obyek wisata tersebut yaitu wisata budaya, wisata alam, wisata religi, wisata kuliner, wisata minat khusus, dan wisata belanja. Kota Yogyakarta disebut kota budaya karena terdapat 2 (dua) pusat budaya sebagai patokan, yakni Kraton Kasultanan dan Pura Pakualaman. Dari kedua pusat budaya tersebut, Yogyakarta disebut dengan daerah yang kaya akan seni dan budaya, terdapat keanekaragaman kebudayaan di Yogyakarta yang merupakan sebagai potensi wisata yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata.

Tabel 1.1

Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke DIY Tahun 2012-2016

**I.7. Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke DIY
Tahun 2012-2016**

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Pertumbuhan (%)	Wisatawan Nusantara	Pertumbuhan (%)	Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	Pertumbuhan (%)
2012	197,751	16.62	2,162,422	50.36	2,360,173	46.80
2013	235,893	19.29	2,602,074	20.33	2,837,967	20.24
2014	254,213	7.77	3,091,967	18.83	3,346,180	17.91
2015	308,485	21.35	3,813,720	23.34	4,122,205	23.19
2016	355,313	15.18	4,194,261	9.98	4,549,574	10.37

Sumber : Statistik Kepariwisata 2016

Kunjungan wisatawan ke Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pada hampir di setiap tahunnya. Berdasarkan data statistik wisatawan ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, grafik perkembangan wisatawan menunjukkan adanya peningkatan di setiap tahunnya. Berdasarkan data terakhir yang masuk pada tahun 2016 terdapat jumlah wisatawan mancanegara sebesar 355.313 dan jumlah wisatawan nusantara mencapai 4.194.261 sehingga untuk total keseluruhan wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta sebesar 4.549.574 wisatawan. Berdasarkan total kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta cukup banyak maka hal ini dapat mempengaruhi pemasukan dalam pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Yogyakarta. Kunjungan wisatawan asing maupun domestik yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan ini akan menjadi peluang besar untuk masyarakat ataupun pemerintah Yogyakarta.

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, untuk tujuan tersebut pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menggali potensi sumber-sumber PAD dan pemerintah harus mentransfer sebagai pendapatan dan atau membagi sebagian pendapatan pajaknya dengan pemerintah daerah. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal. Upaya pemerintah Yogyakarta dalam meningkatkan PAD dengan meningkatkan potensi dalam sektor pariwisata. Pada tahun 2018 Yogyakarta semakin padat dikunjungi wisatawan domestik maupun wisatawan asing.

Menurut Arditia (2013), pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu salah satunya bersumber dari hasil pajak daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari masing-masing daerah hanya dapat menutupi pengeluaran rutin saja dan untuk menutupi pengeluaran lainnya masing-masing daerah harus mengharapkan transfer dari pihak pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya yaitu pemerintah pusat. Sedangkan jenis-jenis pendapatan asli daerah sendiri menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sendiri menyatakan bahwa pendapatan asli daerah terdiri

dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Kebijakan keuangan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dapat dipergunakan oleh daerah untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sehingga dapat memperkecil ketergantungan daerah dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Tujuan yang lebih penting dari peningkatan PAD adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik serta menciptakan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut (Amerta and Budhiasa 2014).

Salah satu faktor yang dapat menunjang pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) adalah faktor pariwisata. Pariwisata juga akan membantu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Sebab pariwisata bisa dikatakan sebagai pergerak dari sektor-sektor lain seperti sektor industri dan jasa. Dampak positif pariwisata terhadap pembangunan ekonomi antara lain, dampak terhadap penciptaan lapangan kerja, sumber devisa negara dan distribusi pembangunan (Spillane 1994).

Provinsi Yogyakarta merupakan kawasan yang strategis dan didukung dengan obyek pariwisata menjadikan Yogyakarta sebagai daerah tujuan utama bagi para wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Yogyakarta karena Yogyakarta merupakan daerah pariwisata yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah sangat erat kaitannya terhadap pendapatan daerah itu sendiri. Jika semakin lama wisatawan tinggal di suatu

daerah tujuan wisata maka semakin banyak uang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit digunakan untuk keperluan makan, minum, dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Sudiana (2016), dengan judul penelitian “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap retribusi obyek wisata. Kunjungan wisatawan, pajak hotel, restoran dan retribusi obyek wisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu terdapat pengaruh tidak langsung dari jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah melalui retribusi obyek wisata dan merupakan variabel mediasi. Sehingga dapat disarankan bahwa sebaiknya pemerintah Kabupaten Bangli lebih gencar melakukan promosi pariwisata agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bangli. Penelitian ini menggunakan metode analisis *Path Analysis*.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Widyaningsih dan Budhi (2014), dengan judul penelitian “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan berpengaruh tidak signifikan secara langsung terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Akan tetapi, secara tidak langsung berpengaruh signifikan melalui penerimaan pajak hotel dan penerimaan restoran. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa

jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Gianyar tahun 1998-2012. Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Gianyar tahun 1998-2012. Jumlah kunjungan wisatawan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gianyar tahun 1998-2012. Maka dari itu, berdasarkan dengan *theory trimming* jalur jumlah kunjungan wisatawan ke PAD dibuang atau dihilangkan. Penerimaan pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar tahun 1998-2012. Penerimaan pajak restoran menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Gianyar tahun 1998-2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Path Analysis* (analisis jalur).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Karamullah dan Handayani (2016), dengan judul penelitian “Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak hotel dan restoran selama tahun 2012-2014 sebesar 13,18% dan 12,35%. Pajak hotel dan restoran dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari persentase yang disumbangkan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) hanya sebesar 5,49% dan 7,50%. Sedangkan untuk pajak hotel dan restoran rata-rata tingkat efektivitas yang diperoleh sebesar 106,44% dan 105,27%. Hal ini membuktikan bahwa tingkat efektivitas sudah sangat maksimal. Upaya yang telah dilakukan pemerintah kota dalam

meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran yaitu melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak serta melakukan pendataan secara berkala. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Suartini dan Utama (2013), dengan judul penelitian “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Gianyar pada tahun anggaran 1991-2010. Dari nilai koefisien regresi standar menunjukkan nilai variabel PHR tertinggi, sehingga dapat disimpulkan PHR memiliki pengaruh paling dominan terhadap PAD Kabupaten Gianyar. Pemerintah daerah disarankan untuk memperbaiki mekanisme pemungutan PHR dan melakukan pendataan ulang terhadap jumlah hotel dan restoran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan data runtun waktu (*time series*).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Amerta dan Budhiasa (2014), dengan judul penelitian “Pengaruh Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Wisatawan Domestik, Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung Tahun 2001-2012” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara memberi pengaruh positif dan signifikan, kunjungan wisatawan domestik memberi pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah hotel dan

akomodasi lainnya. Kunjungan wisatawan mancanegara memberi pengaruh positif dan signifikan, kunjungan wisatawan domestik memberi pengaruh negatif dan signifikan, jumlah hotel dan akomodasi lainnya memberi pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD di Kabupaten Badung tahun 2001-2012. Maka dari itu pembangunan infrastruktur yang menunjang pariwisata di Bali khususnya Kabupaten Badung harus ditingkatkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *Path Analysis*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2014), dengan judul penelitian “Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata dan PHR Terhadap PAD Kabupaten Gianyar” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan retribusi obyek wisata, pajak hotel dan restoran memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gianyar tahun 1993-2012. Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gianyar tahun 1993-2012. Pendapatan retribusi obyek wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Gianyar tahun 1993-2012. Sedangkan pendapatan hotel dan restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gianyar pada tahun 1993-2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis regresi linear berganda dengan data *time series*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rozikin (2016), dengan judul penelitian “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pulau Lombok” hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Lombok. Jumlah hotel memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Lombok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis regresi data panel dengan teknik pengumpulan data secara langsung berupa data *time series* dan *cross section*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Djayastra (2014), dengan judul penelitian “Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Jumlah Tingkat Hunian Kamar Hotel, dan Jumlah Kamar Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, dan Kota Denpasar Tahun 2001-2010” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah wisatawan memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Jumlah tingkat hunian kamar memberi pengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Jumlah kamar hotel memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis regresi linear berganda.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tendean, Palar, dan Tolosang (2014), dengan judul penelitian “Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado melalui Pajak Hotel sebagai Intervening Variabel” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah wisatawan memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Jumlah wisatawan memberi pengaruh positif dan signifikan

terhadap pajak hotel. Pajak hotel memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Jumlah wisatawan memberi pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif dan analisis induktif atau analisis inferensia.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Sunarto dan Fatimah (2016), dengan judul penelitian “Pengaruh Penerimaan Retribusi dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2015” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi dan penetapan tarif obyek wisata memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Penerimaan retribusi memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Penetapan tarif obyek wisata memberi pengaruh yang tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis regresi linear berganda.

Dengan bertambah dan berkebangnya Jumlah Kunjungan Wisatawan, Retribus Obyek Wisata, Pajak Hotel dan Restoran di Provinsi Yogyakarta pastinya akan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat Yogyakarta seperti meningkatkan perekonomian masyarakat, memperluas dan pemeratakan lapangan kerja dan memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal. Akan teteapi hal-hal tersebut juga dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat Yogyakarta sendiri, dampak negatif tersebut berupa : menimbulkan gejala kemacetan, bertambah padatnya penduduk, sulit mengatasi proses pembuangan

limbah sampah, tingkat kebisingan meningkat, dan mengakibatkan perubahan tipologi dan morfologi di Provinsi Yogyakarta.

Maka dari itu pemerintah perlu berupaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, retribusi obyek wisata, pajak hotel dan restoran, agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat memperlancar pembangunan. Untuk mencapai hal ini pemerintah harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah yang dikelola secara efektif dan efisien. Dengan dasar pertimbangan ini, maka Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta sebagai pelaksana pemerintah di daerah secara aktif melakukan upaya pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang salah satunya yaitu melalui hasil kunjungan wisatawan, pendapatan retribusi obyek wisata, serta pendapatan pajak hotel dan restoran. Berdasarkan pemikiran dan keadaan tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang **“PENGARUH JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN, RETRIBUSI OBYEK WISATA, PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI YOGYAKARTA”**. Periode penelitian ini adalah tahun 2013-2016. Yang membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan di Provinsi Yogyakarta, dimana dalam penelitian sebelumnya kebanyakan penelitian dilakukan di Bali, Lombok, Manado, dan Gunung Kidul. Untuk itu peneliti ingin melakukan penelitian secara keseluruhan di Provinsi Yogyakarta.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah jumlah kunjungan wisatawan memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Yogyakarta?
2. Apakah retribusi obyek wisata memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Yogyakarta?
3. Apakah pajak hotel dan restoran memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan hasil yang bermanfaat baik bagi beberapa pihak terkait. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan jumlah

wisatawan, retribusi obyek wisata, pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Yogyakarta.

2. Bagi praktisi, bagi Pemerintah Daerah Yogyakarta, pemerintah ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan masukan bagi lembaga-lembaga yang terkait dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Yogyakarta.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dimaksudkan oleh penulis yaitu guna untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika penelitian dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

1.5.1 Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

1.5.2 Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang teori-teori yang melandasi penelitian ini, penelitian sebelumnya, serta kerangka pemikiran atau alur penelitian.

1.5.3 Bab III : Metodologi Penelitian

Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang metode yang berisi penjelasan variabel penelitian dan definisi operasional, objek penelitian,

populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, penentuan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

1.5.4 Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang jawaban atas rumusan masalah, gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data serta pembahasan analisis data (pembuktian hipotesis).

1.5.5 Bab V : Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan pembahasan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran kepada pihak-pihak terkait mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Moningka dan Richer Ariani (2011), mengatakan sebagai berikut :

“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Definisi pendapatan asli daerah (PAD) menurut Suparmoko (2002), berpendapat sebagai berikut :

“Pendapatan Daerah dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah sendiri, Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pembagian Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Daerah Lainnya yang sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak dan Retribusi Daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah.”

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada Bab I Pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa :

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada Bab II Pasal 3 ayat 1 adalah :

”PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.”

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam daerah sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut menuntut daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari pendapatan asli daerah (Pertiwi 2014).

2.1.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya tidak hanya berasal dari satu sumber, melainkan dari berbagai sumber. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

a. Pajak daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah demi kemakmuran rakyat. Jenis-jenis pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagai berikut :

1. Pajak kendaraan bermotor
 2. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 3. Pajak rokok
 4. Pajak hotel
 5. Pajak restoran
 6. Pajak hiburan
 7. Pajak reklame
 8. Pajak penerangan jalan
 9. Pajak mineral bukan logam dan batuan
 10. Pajak parkir
 11. Pajak air tanah
 12. Pajak sarang burung walet
 13. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- b. Retribusi daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah letak pada timbal balik langsung. Pada pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan retribusi ada timbal balik langsung dari penerima retribusi kepada penerima retribusi.

Menurut objeknya, retribusi digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagai berikut :

1. Retribusi jasa umum, merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan.
2. Retribusi jasa usaha, merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai disediakan oleh swasta dan atau penyewa aset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan, misalnya : retribusi pasar grosir, terminal, rumah potong hewan, dan lain-lain.
3. Retribusi perizinan tertentu, kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka memberikan ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi (Pasal 18 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2000).

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung

jawabkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut bersumber dari:

1. Bagian laba dari perusahaan daerah
 2. Bagian laba dari lembaga keuangan bank (sebagai contoh : Bank Daerah)
 3. Bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya
- d. Lain-lain PAD yang sah

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab V Pasal 6 ayat 2 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu sebagai berikut :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

2.1.3. Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Simanjuntak (2001), untuk mengetahui potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu diketahui adanya beberapa hal sebagai berikut :

1. Kondisi awal suatu daerah
 - a. Besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan.
 - b. Kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Peningkatan cakupan dan intensifikasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan PAD.
3. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita riil.

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Pertumbuhan penduduk

Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik akan meningkat.
5. Tingkat inflasi

Inflasi akan meningkatkan penerimaan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya : pajak hotel.
6. Penyesuaian tarif

Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif. Untuk pajak atau retribusi yang tarifnya

ditentukan secara tetap, maka dalam penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi.

7. Pembangunan baru

Penambahan PAD juga dapat diperoleh bila pembangunan-pembangunan baru ada seperti pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan jasa, pengumpulan sampah, dan lain-lain.

8. Sumber pendapatan baru

Adanya kegiatan usaha baru dapat mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada. Misalnya, usaha persewaan laser disc, usaha persewaan komputer/internet, dan lain-lain.

9. Perubahan peraturan

Adanya perubahan peraturan baru, khususnya yang berhubungan dengan pajak dan atau retribusi jelas akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

2.1.4. Pendapatan Pariwisata

Pendapatan pariwisata merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang berasal dari kegiatan kepariwisataan, seperti retribusi tempat rekreasi dan olahraga, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan lain-lain dengan satuan rupiah pertahun (Yoeti 1996).

Pendapatan pariwisata berasal dari beberapa pendapatan yang dapat diperoleh dari :

1. Pajak Hotel

Pungutan wajib yang dibebankan kepada tiap-tiap hotel yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wajib pajak.

2. Pajak Restoran

Pungutan wajib yang dibebankan kepada tiap-tiap restoran yang telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.

3. Pajak Hiburan

Pungutan wajib yang dibebankan kepada tiap-tiap tempat hiburan yang telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.

4. Retribusi Kios

Pungutan daerah yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin menempati kios disuatu tempat tertentu.

5. Retribusi Kamar Kecil

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas umum berupa kamar kecil di obyek wisata.

6. Retribusi Iklan

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan melakukan promosi atas suatu produk tertentu.

7. Karcis Masuk Obyek Wisata

Pungutan yang dikenakan kepada pengunjung yang masuk ke dalam suatu obyek wisata tertentu.

8. Retribusi Parkir Obyek Wisata

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas umum untuk wilayah parkir kendaraan.

9. Pajak Pembangunan

Pungutan wajib yang diberikan kepada tiap-tiap hotel dan restoran yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wajib pajak.

10. Penerimaan dari Dinas Pariwisata Setempat

Sebagian besar pemerintah daerah belum mengoptimalkan penerimaan retribusi karena masih mendapat dana dari pemerintah pusat. Upaya peningkatan pendapatan daerah sektor pariwisata perlu dikaji pengelolaannya untuk mengetahui berapa besar potensi yang wajar, tingkat efektifitas dan efisiensi. Peningkatan retribusi yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan dalam sektor pariwisata.

Berdasarkan kajian teori diatas maka yang dimaksud dengan pendapatan sektor pariwisata adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah melalui kegiatan pariwisata yang dapat dipungut melalui pajak dan retribusi.

2.1.5. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah wisata tertentu menjadi salah satu bukti bahwa daerah tersebut mempunyai daya tarik wisata yang besar. Beberapa ahli mencoba untuk mendefinisikan kata wisatawan, akan tetapi sebelum membahas tentang pengertian wisatawan sebaiknya kita memahami terlebih dahulu pengertian wisata. Menurut Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan pada Bab I

Pasal 1 ayat 1 yaitu :

“Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.”

Sedangkan pengertian wisatawan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 pada Bab I Pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut :

“Wisatawan (*tourist*) adalah setiap orang yang berpergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dan kunjungan itu.”

Sedangkan pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan pada Bab I Pasal 1 ayat 3 adalah sebagai berikut :

“Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.”

Pacific Area Travel Association (PATA) memberi batasan bahwa wisatawan sebagai orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan dalam jangka waktu 24 jam dan maksimal 3 bulan di dalam suatu negeri yang bukan negeri dimana biasanya ditinggali mereka meliputi :

1. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk bersenang-senang, untuk keperluan pribadi, untuk keperluan kesehatan.
2. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk pertemuan, konferensi, musyawarah atau sebagai utusan berbagai badan/organisasi.

3. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan dengan maksud bisnis pejabat pemerintahan dan militer beserta keluarganya yang ditempatkan di negara lain tidak termasuk kategori ini, tetapi bila mereka mengadakan perjalanan ke negeri lain, maka dapat digolongkan wisatawan (Pendit 1994).

2.1.6. Jenis dan Karakteristik Wisatawan

Wisatawan memiliki tujuan untuk melakukan perjalanan wisata, ada beberapa macam salah satunya untuk bersenang-senang di daerah tujuan wisata suatu daerah tertentu. Berikut merupakan jenis-jenis dan karakteristik wisatawan :

1. Wisatawan lokal (*local tourist*)

Wisatawan yang melakukan perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata yang berasal dari dalam negeri.

2. Wisatawan mancanegara (*international tourist*)

Wisatawan yang mengadakan perjalanan ke daerah tujuan wisata yang berasal dari luar negeri.

3. *Holiday tourist*

Wisatawan yang melakukan perjalanan ke daerah tujuan wisata dengan tujuan untuk bersenang-senang atau untuk berlibur.

4. *Business tourist*

Wisatawan yang berpergian ke daerah tujuan wisata dengan tujuan untuk urusan dagang atau urusan profesi.

5. *Common interest*

Wisatawan yang berpergian ke daerah tujuan wisata dengan tujuan khusus seperti studi ilmu pengetahuan, mengunjungi sanak keluarga atau untuk berobat, dan lain-lain.

6. *Individual tourist*

Wisatawan yang berpergian ke daerah tujuan wisata secara sendiri-sendiri.

7. *Group tourist*

Wisatawan yang berpergian ke daerah tujuan wisata secara bersama-sama atau berkelompok.

Pengaruh langsung kunjungan wisatawan terhadap pendapatan dan perekonomian daerah. Semakin lama wisatawan menginap dalam setiap kunjungan wisata maka secara langsung pengaruh ekonomi dari keberadaan wisatawan tersebut juga semakin meningkat. Selanjutnya pengeluaran wisatawan tersebut menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, pengusaha yang bergerak dibidang pariwisata dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan (Nawawi 2003).

Wisatawan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah wisatawan lokal dan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung di Daerah Istimewa Yogyakarta. Semakin tinggi arus kunjungan wisatawan maka pendapatan pada sektor pariwisata juga semakin meningkat.

2.1.7. Retribusi Obyek Wisata

Pendapatan obyek pariwisata merupakan sumber penerimaan obyek pariwisata yang berasal dari retribusi karcis masuk, retribusi parkir, dan pendapatan lain-lain yang sah berasal dari obyek pariwisata tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah atau yang disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Prakosa 2005).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri atas :

1. Pendapatan asli daerah, yaitu :
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Menurut Munawir (1997), retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak akan dikenakan iuran tersebut. Retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan keuntungan langsung dari layanan tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa retribusi lebih tepat dianggap pajak konsumsi dari pada biaya layanan : bahwa retribusi hanya menutupi biaya operasional saja.

2.1.8. Pajak Hotel

1. Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada Bab I Pasal 1 ayat 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Siahaan 2011).

Tarif tertinggi pajak hotel sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada Pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Pungutan pajak hotel di Indonesia pada saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas serta kuat, jadi harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang Pajak Daerah.
- e. Keputusan Bupati atau Walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten atau kota yang dimaksud.

3. Objek Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 pada Bab III Pasal 4 yang disebut objek pajak pada hotel yaitu pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk juga jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagai

kelengkapan hotel adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Klasifikasi hotel yang dimaksud dalam peraturan tersebut di atas yaitu sebagai berikut :

- a. Gubug pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan, losmen, dan rumah penginapan termasuk apartemen yang menyatu dengan hotel serta rumah kost dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan penunjang fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang telah disediakan khusus untuk tamu hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

4. Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 pada Bab III Pasal 5 yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak yaitu

konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel.

Sedangkan yang menjadi wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dalam bidang jasa penginapan. Maka, pada pajak hotel subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar atau menanggung pajak, sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel tidak bertindak sebagai wajib pajak yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) serta melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2011), menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Untuk Provinsi Yogyakarta menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 pada Bab III Pasal 7 mengatakan bahwa tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

6. Pelaporan Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2011), menyatakan bahwa wajib pajak hotel wajib melaporkan kepada bupati/walikota. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi Surat Pemberian Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada walikota/bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

2.1.9. Pajak Restoran

1. Pajak Restoran

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Pungutan pajak restoran di Indonesia pada saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas serta kuat, jadi harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pungutan pajak restoran pada suatu kabupaten atau kota sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang Pajak Daerah.
- e. Keputusan Bupati atau Walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten atau kota yang dimaksud.

3. Objek Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2011), menyatakan bahwa objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran yaitu rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya.

4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2011), menyatakan pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang

mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2011) menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak restoran yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan atau minuman. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

6. Pelaporan Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2011) menyatakan bahwa wajib pajak restoran wajib melaporkan kepada bupati/walikota. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Suidiana (2016), dengan judul penelitian “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015” hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap retribusi obyek wisata. Kunjungan wisatawan, pajak hotel, restoran dan retribusi obyek wisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu terdapat pengaruh tidak langsung dari jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah melalui retribusi obyek wisata dan merupakan variabel mediasi. Sehingga dapat disarankan bahwa sebaiknya pemerintah Kabupaten Bangli lebih gencar melakukan promosi pariwisata agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bangli. Penelitian ini menggunakan metode analisis *Path Analysis*.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Widyaningsih dan Budhi (2014), dengan judul penelitian “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan berpengaruh tidak signifikan secara langsung terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Akan tetapi, secara tidak langsung berpengaruh signifikan melalui penerimaan pajak hotel dan penerimaan restoran. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Gianyar tahun 1998-2012. Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Gianyar tahun 1998-2012. Jumlah kunjungan wisatawan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gianyar tahun 1998-2012. Maka dari itu, berdasarkan dengan *theory trimming* jalur jumlah kunjungan wisatawan ke PAD dibuang atau

dihilangkan. Penerimaan pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar tahun 1998-2012. Penerimaan pajak restoran menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Gianyar tahun 1998-2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Path Analysis* (analisis jalur).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Karamullah dan Handayani (2016), dengan judul penelitian “Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak hotel dan restoran selama tahun 2012-2014 sebesar 13,18% dan 12,35%. Pajak hotel dan restoran dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari persentase yang disumbangkan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) hanya sebesar 5,49% dan 7,50%. Sedangkan untuk pajak hotel dan restoran rata-rata tingkat efektivitas yang diperoleh sebesar 106,44% dan 105,27%. Hal ini membuktikan bahwa tingkat efektivitas sudah sangat maksimal. Upaya yang telah dilakukan pemerintah kota dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran yaitu melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak serta melakukan pendataan secara berkala. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Suartini dan Utama (2013), dengan judul penelitian “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kunjungan

wisatawan, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Gianyar pada tahun anggaran 1991-2010. Dari nilai koefisien regresi standar menunjukkan nilai variabel PHR tertinggi, sehingga dapat disimpulkan PHR memiliki pengaruh paling dominan terhadap PAD Kabupaten Gianyar. Pemerintah daerah disarankan untuk memperbaiki mekanisme pemungutan PHR dan melakukan pendataan ulang terhadap jumlah hotel dan restoran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan data runtun waktu (*time series*).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Amerta dan Budhiasa (2014), dengan judul penelitian “Pengaruh Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Wisatawan Domestik, Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung Tahun 2001-2012” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara memberi pengaruh positif dan signifikan, kunjungan wisatawan domestik memberi pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah hotel dan akomodasi lainnya. Kunjungan wisatawan mancanegara memberi pengaruh positif dan signifikan, kunjungan wisatawan domestik memberi pengaruh negatif dan signifikan, jumlah hotel dan akomodasi lainnya memberi pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD di Kabupaten Badung tahun 2001-2012. Maka dari itu pembangunan infrastruktur yang menunjang pariwisata di Bali khususnya Kabupaten Badung harus ditingkatkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *Path Analysis*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2014), dengan judul penelitian “Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata dan PHR Terhadap PAD Kabupaten Gianyar” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan retribusi obyek wisata, pajak hotel dan restoran memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gianyar tahun 1993-2012. Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gianyar tahun 1993-2012. Pendapatan retribusi obyek wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Gianyar tahun 1993-2012. Sedangkan pendapatan hotel dan restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gianyar pada tahun 1993-2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis regresi linear berganda dengan data *time series*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rozikin (2016), dengan judul penelitian “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pulau Lombok” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Lombok. Jumlah hotel memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Lombok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis regresi data panel dengan teknik pengumpulan data secara langsung berupa data *time series* dan *cross section*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Djayastra (2014), dengan judul penelitian “Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Jumlah Tingkat Hunian Kamar Hotel, dan Jumlah Kamar Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, dan Kota Denpasar Tahun 2001-2010” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah wisatawan memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Jumlah tingkat hunian kamar memberi pengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Jumlah kamar hotel memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis regresi linear berganda.

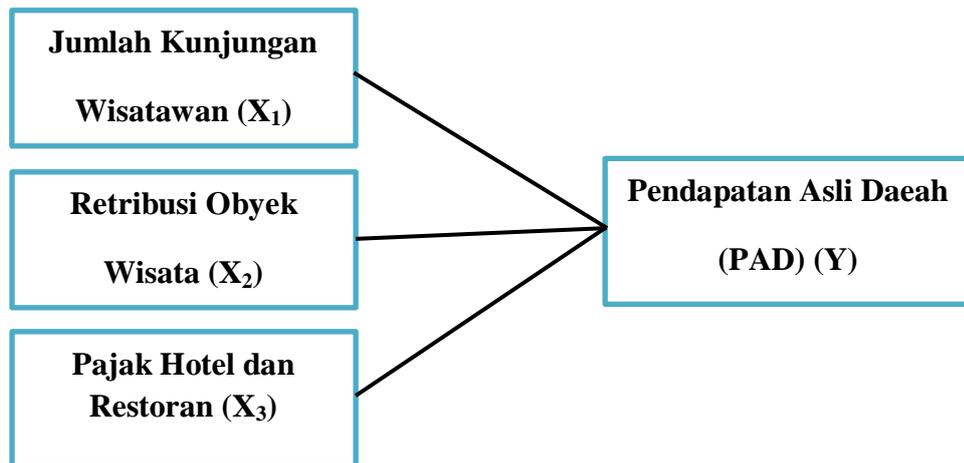
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tendean, Palar, dan Tolosang (2014), dengan judul penelitian “Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado melalui Pajak Hotel sebagai Intervening Variabel” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah wisatawan memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Jumlah wisatawan memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap pajak hotel. Pajak hotel memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Jumlah wisatawan memberi pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif dan analisis induktif atau analisis inferensia.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Sunarto dan Fatimah (2016), dengan judul penelitian “Pengaruh Penerimaan Retribusi dan Penetapan Tarif

Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2015” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi dan penetapan tarif obyek wisata memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Penerimaan retribusi memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Penetapan tarif obyek wisata memberi pengaruh yang tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis regresi linear berganda.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang akan menjelaskan tentang pengaruh variabel-variabel terkait dapat digambarkan sebagai berikut :



Bersarkan bagan di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini melihat pengaruh variabel jumlah kunjungan wisatawan, retribusi obyek wisata, pajak hotel, dan pajak restoran sebagai variabel independen (X) yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variabel dependennya (Y).

2.4. Perumusan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Yogyakarta

Terdapat beberapa manfaat jika banyak wisatawan yang dapat berkunjung ke suatu tujuan wisata tertentu, salah satunya melalui penerimaan berbagai retribusi dan pajak yang telah disetorkan kepada daerah.

Pengaruh langsung kunjungan wisatawan terhadap pendapatan dan perekonomian daerah. Semakin lama wisatawan menginap dalam setiap kunjungan wisata, maka secara langsung pengaruh ekonomi dari keberadaan wisatawan tersebut juga semakin meningkat. Pengeluaran wisatawan tersebut menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah (PAD), pengusaha yang bergerak dibidang pariwisata dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan (Nawawi 2003).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Sudiana (2016), Pertiwi (2014), Suartini dan Utama (2013), Rozikin (2016), Wijaya dan Djayastra (2014), Tendean, Palar, dan Tolosang (2014), dan Amerta dan Budhiasa (2014) menemukan bahwa jumlah kunjungan wisatawan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 = Jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Yogyakarta.

2.4.2. Pengaruh Retribusi Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Yogyakarta

Pendapatan obyek pariwisata merupakan penerimaan obyek pariwisata yang berasal dari retribusi karcis masuk, retribusi parkir, dan pendapatan lain-lain yang sah berasal dari obyek pariwisata tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2014), Sunarto dan Fatimah (2016), dan Wijaya dan Sudiana (2016) menunjukkan bahwa retribusi obyek wisata memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2 = Retribusi obyek wisata berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Yogyakarta.

2.4.3. Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Yogyakarta

Pembayaran pajak oleh orang pribadi dan perusahaan kepada pemerintah akan mempengaruhi pendapatan kepada pihak pemerintah dan merupakan sumber pendapatan utama. Hal ini berarti kontribusi dari pajak

hotel dan restoran dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2014), Wijaya dan Sudiana (2016), Widyaningsih dan Budhi (2014), Tendean, Palar, dan Tolosang (2014), dan Suartini dan Utama (2013) menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Karamullah dan Handayani (2016), menyatakan bahwa berdasarkan tingkat efektivitasnya pajak hotel dan pajak restoran telah memenuhi kriteria efektivitas. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3 = Pajak hotel dan restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Yogyakarta.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan berupa data kuantitatif, merupakan data yang diukur dalam suatu skala numerik. Menurut Sugiyono (2015a), metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel ini pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan data deret berkala (*time series*), atau runtut waktu selama empat tahun yaitu dari tahun 2013-2016. Menurut Sugiyono (2015a), sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau bahan yang sifatnya teoritis yang relevan dengan penelitian yang diperoleh dari buku-buku, artikel, internet, dan media lain.

Data sekunder yang digunakan untuk melengkapi data peneliti yang digunakan untuk melengkapi data peneliti diperoleh dari terbitan atau laporan suatu lembaga terkait. Data yang digunakan antara lain :

1. Jumlah Wisatawan Provinsi Yogyakarta yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Provinsi Yogyakarta.
2. Retribusi Obyek Wisata Provinsi Yogyakarta yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Provinsi Yogyakarta.
3. Pajak Hotel dan Restoran yang diperoleh dari DPPKA Provinsi Yogyakarta.
4. Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari DPPKA Provinsi Yogyakarta.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data yang telah tersedia dan telah diproses. Sumber data tersebut antara lain :

1. Dinas Pariwisata Provinsi Yogyakarta.
2. DPPKA Provinsi Yogyakarta.

3.2. Penentuan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan kunjungan wisatawan, retribusi obyek wisata, pajak hotel, dan pajak restoran Provinsi Yogyakarta dari tahun 2013-2016. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampel total. Menurut Sugiyono (2015a), metode sampel total yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan menjadi sampel.

3.3. Variabel Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka dapat diidentifikasi bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel dependen (variabel terikat)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (variabel independen) (Sugiyono 2015a). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Yogyakarta.

2. Variabel independen (variabel bebas)

Variabel independen yaitu variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (Sugiyono 2015a). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu :

- a. Variabel (X_1) : Jumlah Wisatawan
- b. Variabel (X_2) : Retribusi Obyek Wisata
- c. Variabel (X_3) : Pajak Hotel dan Restoran

3.4. Teknik Analisis Data

3.4.1. Uji Data Deskriptif

Menurut Sugiyono (2015b), uji data deskriptif yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain uji data deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil dari penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

3.4.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terhadap model regresi yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah model regresi tersebut baik atau tidak. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menerapkan statistik nonparametrik dengan *Kolmogrov Smirnov*. Ketentuan yang harus dipenuhi berupa data residual normal yaitu ketika nilai sig yang dihasilkan lebih besar dari 0,05. Sedangkan data tidak residual normal yaitu ketika nilai sig yang dihasilkan kurang dari 0,05.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel bebas (independen), dengan melihat nilai *variance inflation factor* (VIF); apabila $VIF > 10$ maka menunjukkan adanya gejala multikolinieritas. Sebaliknya, apabila nilai VIF kurang dari 10 maka tidak ada gejala multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji adanya ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali 2013). Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas.

Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat pola titik – titik pada *scatterplots* regresi. Jika titik – titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali 2013). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data dengan runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” pada individu atau kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan Durbin Waston (DW test) karena sampel yang digunakan dibawah 100. Sedangkan jika sampel diatas 100 maka harus menggunakan *Lagrange Multiplier* (LM test). Uji Durbin Waston hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen (Ghozali 2013).

3.5. Uji Ketepatan Model

3.5.1. Uji F (Uji Simultan)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh simultan

(bersama-sama) terhadap variabel dependen atau tidak. Cara untuk menguji yaitu jika nilai yang dihasilkan uji F probabilitas $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Cara lain yaitu membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F hitung $> F$ tabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Latan dan Temalagi 2008).

3.5.2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Supangat (2008), pengertian koefisien determinasi yaitu merupakan besaran untuk menunjukkan tingkat kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam bentuk persen (menunjukkan seberapa besar persentase keragaman Y yang dapat dijelaskan oleh keragaman X), atau dengan kata lain seberapa besar X dapat memberikan kontribusi terhadap Y. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Kelemahan mendasar menggunakan *R-Squares* yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model.

Dianjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R-Squares* dalam mengevaluasi model regresi, dimana nilainya dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan dalam model. Pada beberapa contoh kasus, nilai *adjusted R-Squares* dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Jika dalam uji regresi didapat nilai *adjusted R-Squares* negatif, maka nilai tersebut dianggap nol.

3.5.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda merupakan peralatan statistika yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen dalam penelitian ini, seberapa besar pengaruh wisatawan dan retribusi hotel sebagai variabel independen terhadap pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen, pengujian data dilakukan dengan program SPSS 23 (*Statistical Package for Social Science*). Menurut Ghozali (2013), analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen.

Persamaan regresi linear berganda (*Multiple linear regression*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi

X_1 = Jumlah Wisatawan

X_2 = Retribusi Obyek Wisata

X_3 = Pajak Hotel dan Restoran

e = *Error*

3.5.4. Uji Hipotesis

Menurut Ghozali (2013), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

Berdasarkan letak peta geografis Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di selatan-tengah Pulau Jawa yang dibatasi oleh Samudera Hindia di selatan dan Provinsi Jawa Tengah di sekitarnya. Batas dengan Provinsi Jawa Tengah meliputi :

1. Bagian tenggara ada Kabupaten Wonogiri
2. Bagian timur laut ada Kabupaten Klaten
3. Bagian barat laut ada Kabupaten Magelang
4. Bagian barat ada Kabupaten Purworejo

Berdasarkan letak astronomis, Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada 70 33' LS – 8 12' LS dan 110 00' BT – 110 50' BT. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas wilayah sebesar 3.185,80 km serta terdiri dari 4 kabupaten (Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul) dan 1 kota (Kota Yogyakarta). Pada setiap kabupaten dan kota yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kondisi fisik yang berbeda-beda yang mengakibatkan potensi alam yang tidak sama antara tiap kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan sebuah gambaran atau deskripsi pada suatu data yang dilihat dari sebuah nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi). Hasil dari perhitungan statistik deskriptif adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Statistik Deskriptif

Statistics

	Jumlah	Retribusi Obyek	Pajak Hotel dan	Pendapatan Asli
	Kunjungan	Wisata	Restoran	Daerah
	Wisatawan			
N Valid	18	18	18	18
Missing	0	0	0	0
Minimum	695.850,00	0,00	431.477.150,00	20.676.786.154,33
Maximum	5.942.468,00	23.383.852.700,00	159.000.000.000,00	718.151.492.310,00
Mean	3.503.733,75	7.021.862.023,94	46.471.221.300,80	247.933.512.540,10
Std.	1.713.172,20	7.097.375.873,80	57.331.116.126,12	198.164.833.115,38

Deviation

Sumber data : Pengolahan data sekunder (SPSS)

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Pada tabel 4.1 telah menunjukkan bahwa nilai minimum yang dimiliki pada jumlah kunjungan wisatawan dari seluruh data sampel yaitu 695.850 orang pada tahun 2013 di daerah Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan nilai maksimum dari seluruh data sampel sebesar 5.942.468 orang pada tahun 2016 di daerah Kabupaten Sleman. Nilai mean pada jumlah kunjungan wisatawan dari seluruh data sampel yaitu sebesar 3.503.733,75 orang. Serta nilai standar

deviasi pada jumlah kunjungan wisatawan dari seluruh data sampel yaitu sebesar 1.713.172,20 orang.

2. Retribusi Obyek Wisata

Berdasarkan pada tabel 4.1 telah menunjukkan bahwa nilai minimum yang dimiliki pada retribusi obyek wisata dari seluruh sampel yang ada sebesar Rp 0,00 sepanjang tahun 2013-2016 pada daerah Kota Yogyakarta, ini dikarenakan berdasarkan data yang ada pada tahun 2013-2016 di daerah Kota Yogyakarta tidak ada pungutan (TAP). Sedangkan nilai maksimum yang ditunjukkan dari seluruh sampel yang ada sebesar Rp 23.383.852.700,00 pada tahun 2016 di daerah Kabupaten Gunung Kidul. Nilai mean pada retribusi obyek wisata dari seluruh sampel yang ada sebesar Rp 7.021.862.023,94. Serta nilai standar deviasi pada retribusi obyek wisata dari seluruh sampel yang ada sebesar Rp 7.097.375.873,80.

3. Pajak Hotel dan Restoran

Berdasarkan pada tabel 4.1 telah menunjukkan bahwa nilai minimum yang dimiliki pada pajak hotel dan restoran dari seluruh sampel yang ada sebesar Rp 431.477.150,00 pada tahun 2013 di daerah Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan nilai maksimum yang ditunjukkan dari seluruh sampel yang ada sebesar Rp 159.000.000.000,00 pada tahun 2017 di daerah Kota Yogyakarta. Nilai mean pada pajak hotel dan restoran dari seluruh sampel yang ada sebesar Rp 46.471.221.300,80. Serta nilai standar deviasi pada pajak hotel dan restoran dari seluruh sampel yang ada sebesar Rp 57.331.116.126,12.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan pada tabel 4.1 telah menunjukkan bahwa nilai minimum pada pendapatan asli daerah dari seluruh data sampel yang ada sebesar Rp 20.676.786.154,33 pada tahun 2013 di daerah Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan nilai maksimum yang diperoleh dari seluruh sampel yang ada sebesar Rp 718.151.492.310,00 pada tahun 2017 di daerah Kabupaten Sleman. Nilai mean pada pendapatan asli daerah dari seluruh data sampel yang ada sebesar Rp 247.933.512.540,10. Nilai standar deviasi pada pendapatan asli daerah dari seluruh data sampel yang ada sebesar Rp 198.164.833.115,38.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali 2016). Hasil pengujian menunjukkan distribusi normal, jika nilai sig > 0,05. Sedangkan untuk data yang tidak distribusi normal yaitu ketika nilai sig < 0,05. Hasil pengolahan data uji normalitas dengan *One Sample Kolmogorov-Smirnov* (KS) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual		
N		18
Normal Parameters^{a,b}	Mean	,0000093
	Std. Deviation	65933503542,06391000
Most Extreme Differences	Absolute	,165
	Positive	,165
	Negative	-,104
Test Statistic		,165
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber : Pengolahan data sekunder (SPSS)

Berdasarkan pada tabel 4.2 hasil uji normalitas dapat dilihat nilai *probability value* sebesar 0,200. Dari hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa nilai *probability value* $> 0,05$ atau $0,200 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali 2016). Masalah pada uji multikolinieritas dideteksi dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), jika nilai $VIF \geq 10$ maka menunjukkan adanya gejala multikolinieritas atau nilai $VIF \leq 10$ maka tidak ada gejala multikolinieritas. Hasil dari perhitungan uji multikolinieritas dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.3

Uji Multikolinieritas

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	,236	4,239
	Retribusi Obyek Wisata	,404	2,473
	Pajak Hotel dan Restoran	,181	5,537

Sumber : Pengolahan data sekunder (SPSS)

Berdasarkan pada tabel 4.3 hasil uji multikolinieritas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* pada semua variabel lebih besar dari 0,10 dimana nilai *tolerance* berkisar antara 0,181 sampai dengan 0,404. Sedangkan untuk nilai VIF lebih kecil dari 10 (tidak terdapat nilai VIF lebih dari 10), dimana nilai VIF berkisar antara 2,473 sampai dengan 5,537. Ini berarti hasil uji multikolinieritas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidak samaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan apabila berbeda maka disebut Heteroskedastisitas (Ghozali 2016). Hasil uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan berdasarkan sampel yang ada dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.4

Uji Heteroskedastisitas**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standar	t	Sig.
		B	Std. Error	dized		
				Coeffici		
				ents		
				Beta		
1	(Constant)	-1313641601,672	43121383217,439		-,030	,976
	Jumlah					
	Kunjungan	71224,116	21291,142	,663	3,345	,005
	Wisatawan					
	Retribusi Obyek	-7,710	3,905	-,299	-1,975	,068
	Wisata					
	Pajak Hotel dan	,855	,822	,236	1,040	,316
	Restoran					

Sumber : Pengolahan data sekunder (SPSS)

Berdasarkan pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa hampir semua variabel independen tidak signifikan pada 0,05 kecuali pada data Jumlah Kunjungan Wisatawan. Untuk penjelasan masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Nilai signifikansi Jumlah Kunjungan Wisatawan pada uji heteroskedastisitas sebesar 0,005. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau $0,005 < 0,05$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas pada Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- b. Nilai signifikansi Retribusi Obyek Wisata pada uji heteroskedastisitas sebesar 0,068. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau $0,068 > 0,05$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada Retribusi Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- c. Nilai signifikansi Pajak Hotel dan Restoran pada uji heteroskedastisitas sebesar 0,316. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau $0,316 > 0,05$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Apabila terjadi korelasi maka terdapat problem autokorelasi. Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi yaitu dengan uji Durbin-Watson (DW). Hasil dari uji autokorelasi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.5

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,933 ^a	,870	,842	72.655.182.254,76959	2,281

Sumber : Pengolahan data sekunder (SPSS)

Berdasarkan pada tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa nilai uji Durbin-Watson (DW) sebesar 2,281 dibandingkan dengan nilai tabel derajat kepercayaan 5%, jumlah data observasi dari seluruh sampel yang ada sebesar 18 dan variabel independen ($k=3$), diperoleh nilai tabel Durbin-Watson (DW) $dL = 0,9331$ dan $dU = 1,6961$. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,281 lebih besar dari batas atas (dU) sebesar 1,6961 atau nilai Durbin-Watson (DW) terletak diantara batas atas (dU) dan $4-dU$ yaitu sebesar $1,6961 < 2,281 < 2,3039$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi serta data dapat diuji lebih lanjut.

4.2.3. Uji Ketetapan Model

1. Uji F (Uji Simultan)

Uji F memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi secara simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali 2016). Uji F hanya digunakan untuk mengetahui model yang digunakan tepat atau tidak. Kriteria pengujiannya yaitu jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ atau probabilitas $<$ nilai signifikan (0,05) maka model yang digunakan tepat. Hasil dari uji F sebagai berikut :

Tabel 4.6

Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4954433140789960000000	3	165147771359665340	31,285	,000 ^b
	00,000		000000,000		
Residual	7390285711863299500000	14	527877550847378500		
	0,000		0000,000		
Total	5693461711976290000000	17			
	00,000				

Sumber : Pengolahan data sekunder (SPSS)

Berdasarkan dari uji F pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai P-Value sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 serta diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 31,285. Nilai F tabel pada taraf signifikansi 5% dengan df (3; 14) yaitu sebesar 3,34. Sehingga nilai F hitung > F tabel yaitu $31,285 > 3,34$. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis tidak dapat ditolak yang artinya Jumlah Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata, serta Pajak Hotel dan Restoran secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi (R^2) antara nol (0) dan satu (1). Semakin nilai R^2 mendekati satu maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen

(Ghozali 2016). Hasil yang diberikan oleh uji koefisien determinasi (R^2) yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.7

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the Estimate
			Square	
1	,933 ^a	,870	,842	72.655.182.254,76959

Sumber : Pengolahan data sekunder (SPSS)

Berdasarkan pada hasil pengolahan data pada tabel 4.7 di atas, data menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) dinyatakan dalam Adjusted R Square (R^2) sebesar 0,842 atau sebesar 84,2%. Hal ini menunjukkan bahwa 84,2% variasi atau Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variasi Jumlah Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata, serta Pajak Hotel dan Restoran sisanya sebesar 15,8% dijelaskan oleh variabel independen lain di luar model penelitian ini.

4.2.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis linear berganda. Analisis ini digunakan untuk melihat pengaruh sejumlah variabel independen yaitu Jumlah Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata, serta Pajak Hotel dan Restoran terhadap variabel dependen berupa Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh persamaan sebagai berikut :

Tabel 4.8

Analisis Regresi Linear Berganda**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	-1313641601,672	43121383217,439
	Jumlah Kunjungan	71224,116	21291,142
	Wisatawan		
	Retribusi Obyek	-7,710	3,905
	Wisata		
	Pajak Hotel dan	,855	,822
	Restoran		

Sumber : Pengolahan data sekunder (SPSS)

$$Y = a + X_1 + X_2 + X_3 + e$$

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan Asli Daerah} = & -1313641601,672 + 71224,116 X_1 - 7,710X_2 \\ & + 0,855X_3 + e \end{aligned}$$

Berdasarkan pada tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa masing-masing nilai koefisien dalam persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Konstanta dari data tabel 4.8 sebesar -1313641601,672 menyatakan bahwa apabila nilai variabel independen dianggap nol (0) yaitu $X_1=0$, $X_2=0$, dan $X_3=0$ maka pendapatan asli daerah di Provinsi Yogyakarta semakin brekurang.
2. Koefisien regresi untuk variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan bernilai positif sebesar 71224,116 yang artinya jika terjadi kenaikan pada nilai variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan sebesar

1% maka akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 71224,116%.

3. Koefisien regresi untuk variabel Retribusi Obyek Wisata bernilai negatif sebesar -7,710 yang artinya jika terjadi kenaikan pada nilai variabel Retribusi Obyek Wisata sebesar 1% maka akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah sebesar -7,710%
4. Koefisien regresi untuk variabel Pajak Hotel dan Restoran bernilai positif sebesar 0,855 yang artinya jika terjadi kenaikan ada nilai variabel Pajak Hotel dan Restoran sebesar 1% maka akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,855%.

4.2.5. Uji Hipotesis (Uji Signifikansi t)

Uji Hipotesis (uji signifikansi t) memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali 2016). Dapat diketahui nilai observasi $n = 18$, jumlah variabel $k=3$ dengan taraf signifikan $\alpha = 5\%$, $df = 14$ ($n-k-1$) dapat diketahui bahwa nilai signifikansi t tabel sebesar 2,14479. Untuk hasil uji statistik t dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.9

Uji Signifikansi t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-1313641601,672	43121383217,439		-,030	,976
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	71224,116	21291,142	,663	3,345	,005
	Retribusi Obyek Wisata	-7,710	3,905	-,299	-1,975	,068
	Pajak Hotel dan Restoran	,855	,822	,236	1,040	,316

Sumber : Pengolahan data sekunder (SPSS)

Berdasarkan yang telah dijabarkan pada tabel 4.9 di atas maka dapat dijelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli

Daerah

Berdasarkan uji signifikansi t pada tabel 4.9 diperoleh nilai t hitung sebesar 3,345 dan nilai signifikansi sebesar 0,005. Pada nilai t hitung dengan nilai 3,345 lebih besar dari nilai t tabel 2,14479 ($3,345 > 2,14479$) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($0,005 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Pengaruh Retribusi Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan uji statistik t pada tabel 4.9 diperoleh nilai t hitung sebesar -1,975 dan nilai signifikansi sebesar 0,068. Pada nilai t hitung dengan nilai -1,975 kurang dari nilai t tabel -2,14479 ($-1,975 < -2,14479$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,068 > 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Retribusi Obyek Wisata tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan uji statistik t pada tabel 4.9 diperoleh nilai t hitung sebesar 1,040 dan nilai signifikansi sebesar 0,316. Pada nilai t hitung dengan nilai 1,040 kurang dari nilai t tabel 2,14479 ($1,040 < 2,14479$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,316 > 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel dan Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembuktian Hipotesis)

4.3.1. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Diketahui dari perolehan nilai t hitung sebesar 3,345 dan nilai signifikansi sebesar 0,005. Pada nilai t hitung dengan nilai 3,345 lebih besar dari nilai t tabel 2,14479 ($3,345 > 2,14479$) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($0,005$

$< 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Menurut penulis berdasarkan pada data penelitian kunjungan wisatawan ke Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2013-2016 telah mengalami kenaikan jumlah pengunjung hampir disetiap tahunnya. Tidak hanya pada jumlah kunjungan wisatawan, namun pada pendapatan asli daerah Provinsi Yogyakarta juga mengalami kenaikan hampir di setiap tahunnya selama tahun 2013-2016. Sehingga dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang ada bahwa jumlah kunjungan wisatawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Yogyakarta.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan secara teori sudah mendukung hipotesis yang telah diajukan yang menyatakan bahwa Jumlah Kunjungan Wisatawan di Provinsi Yogyakarta berpengaruh signifikan terhadap Pendaptan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini kurang sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dilakukan oleh Widyaningsih dan Budhi (2014) menyatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berbeda pula dengan penelitian yang dilakukn oleh Amerta dan Budhiasa (2014) yang menyatakan bahwa kunjungan wisatawan domestik menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Serta berbeda pula dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Tendeau, Palar, dan Tolosang (2014) yang telah menyatakan bahwa jumlah wisatawan memberikan pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian ini menunjukkan kesesuaiannya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijaya dan Sudiana (2016), Suartini dan Utama (2013), Amerta dan Budhiasa (2014), Pertiwi (2014), Rozikin (2016), serta Wijaya dan Djayastra (2014) dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Jumlah kunjungan wisatawan pada tiap wilayah Kabupaten dan kota Yogyakarta mengalami kenaikan kecuali pada wilayah dan tahun tertentu seperti pada Kota Yogyakarta dimana setiap tahunnya di tahun 2013-2015 mengalami kenaikan jumlah kunjungan wisatawan akan tetapi terdapat sedikit penurunan di tahun 2016, dimana pada tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan mencapai 5.621.265 wisatawan sedangkan pada tahun 2016 hanya 5.520.952 wisatawan. Penurunan yang terjadi sebanyak 100.313 kunjungan wisatawan atau sebesar 1,78%.

4.3.2. Pengaruh Retribusi Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian dapat kita ketahui bahwa uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Retribusi Obyek Wisata tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan perolehan nilai t hitung sebesar -1,975 dan nilai signifikansi sebesar 0,068. Pada nilai t hitung dengan nilai -1,975 kurang dari dari nilai t tabel -2,14479 ($-1,975 < -2,14479$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,068 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Retribusi Obyek Wisata tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Menurut pendapat penulis berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 objek retribusi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Berdasarkan pada Pasal 127 retribusi obyek wisata termasuk ke dalam jenis retribusi jasa usaha. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2017 menyatakan bahwa retribusi merupakan pungutan daerah atas pemberian izin atau pembayaran jasa dari pemerintah untuk orang pribadi atau badan. Menurut penulis, hasil dari retribusi obyek wisata ini relatif kecil sehingga kurang bisa untuk mendorong kenaikan atau perkembangan pendapatan asli daerah setempat.

Disamping itu, menurut Ais (2017) dengan berita yang berjudul “BPK Temukan 11 Temuan dalam PAD Kota Yogya” telah menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2016 telah ditemukan 11 temuan yang terjadi di Kota Yogyakarta oleh BPK. Temuan tersebut terdiri dari 6 temuan ketidakpatuhan dan 5 temuan terkait mengenai implementasi Sistem Pengendalian Internal (SPI). BPK telah menemukan 11 temuan terkait hubungannya tentang beberapa retribusi dan pajak, dengan sistem yang kurang diimplementasikan dengan tepat dapat menyebabkan salah satu terjadinya kendala dalam peningkatan pendapatan asli daerah setempat.

Menurut Sidik (2017) dalam berita yang berjudul “Pemkab: Kebocoran Retribusi Wisata Bukan Penyimpangan Petugas” telah menjelaskan bahwa telah terjadi kebocoran pungutan retribusi pariwisata di beberapa tempat obyek wisata yang dikarenakan jumlah wisatawan yang melampaui batas sehingga para petugas kewalahan untuk memberikan pelayanan. Kurangnya petugas di

gerbang tempat pemungutan retribusi ini memicu terjadinya beberapa masalah seperti tidak tertagihnya retribusi masuk obyek wisata di daerah setempat. Kejadian seperti ini kerap terjadi pada saat liburan sekolah, libur natal, *weekend*, dan libur nasional lainnya. Hal tersebut memicu kontribusi dari sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah tidak sesuai dengan jumlah riil dari pengunjung yang masuk ke obyek wisata tersebut karena perolehan daerah wisatawan berdasarkan pada penjualan tiket.

Menurut Rap (2017) dalam berita yang berjudul “Sistem E-Ticketing Diharapkan Dapat Mencegah Kebocoran Retribusi Wisata” telah menjelaskan bahwa demi untuk mencegah terjadinya kebocoran pada retribusi wisata, pemerintah telah menetapkan bahwa pembayaran retribusi dilakukan berdasarkan sistem secara *online* atau disebut dengan *e-ticketing*. Penggunaan *e-ticketing* ini diharapkan semuanya dapat dijalankan tidak secara manual lagi sehingga dapat mencegah kebocoran yang telah terjadi di sektor pariwisata.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pada pasal 6 dapat diketahui bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah menjelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pada Pasal 18 ayat (2) telah menjelaskan tentang penggolongan retribusi

berdasarkan objeknya, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Dalam penelitian yang telah dilakukan ini kurang sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sunarto dan Fatimah (2016), Wijaya dan Sudiana (2016), dan Pertiwi (2014) dimana penelitian-penelitian tersebut menyatakan bahwa penerimaan retribusi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Retribusi obyek wisata pada tiap-tiap wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Yogyakarta mengalami perkembangan yang cukup baik. Rata-rata disetiap wilayahnya mengalami kenaikan pendapatan retribusi obyek wisata pada tiap tahunnya selama tahun 2013-2016. Akan tetapi di wilayah Kabupaten Sleman perkembangannya sedikit kurang stabil. Pada tahun 2013 retribusi obyek wisata di Kabupaten Sleman sebesar Rp 1.128.272.723 sedangkan ditahun berikutnya pada tahun 2014 Kabupaten Sleman mengalami sedikit penurunan pendapatan retribusi obyek wisata menjadi Rp 985.581.500 atau sebesar 12,65%. Sedangkan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi Rp 4.526.405.500 atau sebesar 459,26% dari tahun sebelumnya (2014). Sedangkan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016 Kabupaten Sleman mengalami sedikit penurunan menjadi Rp 4.450.658.000 atau sebesar 1,67% dari tahun sebelumnya (2015).

4.3.3. Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian dapat kita ketahui bahwa uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pajak Hotel dan Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan perolehan nilai t hitung sebesar 1,040 dan nilai signifikansi sebesar 0,316. Pada nilai t hitung dengan nilai 1,040 kurang dari nilai t tabel 2,14479 ($1,040 < 2,14479$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,316 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel dan Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Menurut pendapat penulis berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana pajak hotel dan restoran termasuk ke dalam kategori jenis pajak kabupaten/kota serta telah dijelaskan pula pada Pasal 35 ayat 1 bahwa tarif pajak hotel telah ditetapkan sebesar maksimal 10% dan dijelaskan pada Pasal 40 ayat 1 bahwa tarif pajak restoran sebesar maksimal 10%, dengan tarif sebesar 10% tidak cukup kuat untuk mendukung kenaikan pada pendapatan asli daerah dibandingkan dengan tarif pajak dari sektor yang lain. Sehingga jika kita melihat hanya dari sektor pendapatan pajak hotel dan restoran saja maka hasilnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Yogyakarta karena terdapat pendapatan pajak yang lebih besar dibandingkan dari pendapatan pajak hotel dan restoran saja.

Telah dijelaskan pula didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah selanjutnya disebut dengan pajak yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyatnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pada pasal 6 menjelaskan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam penelitian yang telah dilakukan ini kurang sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wijaya dan Sudiana (2016), Widyaningsih dan Budhi (2014), Suartini dan Utama (2013), Pertiwi (2014), serta Tendean, Palar, dan Tolosang (2014) dimana hasil dari penelitian-penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak hotel dan restoran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Terkecuali pada penelitian yang dilakukan oleh Karamullah dan Handayani (2016) yang menyatakan bahwa pajak hotel memberikan kontribusi yang kurang maksimal terhadap pendapatan asli daerah pada Kota Surabaya.

Pendapatan pajak hotel dan restoran yang ada di tiap-tiap wilayah kabupaten dan kota Yogyakarta pada setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2013-2016. Akan tetapi kenaikan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan bagi pendapatan asli daerah di Provinsi Yogyakarta.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data serta pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini berdasarkan pada nilai t hitung sebesar 3,345 dan nilai signifikansi sebesar 0,005. Pada nilai t hitung dengan nilai 3,345 lebih besar dari nilai t tabel 2,14479 ($3,345 > 2,14479$) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($0,005 < 0,05$).
2. Retribusi Obyek Wisata tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini berdasarkan pada nilai t hitung sebesar -1,975 dan nilai signifikansi sebesar 0,068. Pada nilai t hitung dengan nilai -1,975 kurang dari dari nilai t tabel -2,14479 ($-1,975 < -2,14479$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,068 > 0,05$).
3. Pajak Hotel dan Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini berdasarkan pada nilai t hitung sebesar 1,040 dan nilai signifikansi sebesar 0,316. Pada nilai t hitung dengan nilai 1,040 kurang dari nilai t tabel 2,14479 ($1,040 < 2,14479$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,316 > 0,05$).

5.2. Keterbatasan Penelitian

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas hingga tahun 2016 saja, hal ini karena belum terpublikasinya data pada 2017, sehingga data belum bisa menampilkan hingga tahun 2017.
2. Pada sampel di tahun 2013 pada penelitian ini menggunakan data anggaran dikarenakan pihak DPPKA hanya mempunyai dan memberikan data tersebut, sehingga pada tahun 2013 menggunakan data anggaran dan di tahun 2014-2016 menggunakan data realisasi.
3. Penelitian hanya terbatas pada data sekunder saja, tidak ada konfirmasi atau keterangan lebih lanjut melalui wawancara ataupun kuesioner.

5.3. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan peneliti kepada peneliti berikutnya sebagai berikut :

1. Penelitian sebaiknya dilakukan dengan kurun waktu yang lebih diperpanjang, misalnya mengambil sampel untuk kurun waktu 10 tahun.
2. Peneliti dapat menjelaskan lebih rinci lagi penyebab tidak berpengaruhnya retribusi obyek wisata dan pajak hotel dan restoran, karena dilihat dari pendapatan kedua variabel tersebut cukup berkontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

Sedangkan saran yang dapat peneliti berikan kepada pemerintah yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah sebaiknya melakukan peningkatan program melalui promosi pariwisata dan meningkatkan perawatan fasilitas yang lebih baik pada tiap obyek wisata yang ada di Provinsi Yogyakarta. Karena fasilitas yang baik dan nyaman akan mempengaruhi kunjungan wisatawan ke obyek wisata.
2. Pemerintah sebaiknya meningkatkan sistem pengendalian internal yang ada di pemerintahan guna untuk mencegah adanya kecurangan ataupun kebocoran yang tidak diinginkan serta guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ais. 2017. BPK Temukan 11 Temuan Dalam PAD Kota Yogya. *Tribun Jogja*, March. (<http://jogja.tribunnews.com/2017/03/16/bpk-temukan-11-temuan-dalam-pad-kota-yogya>, diakses tanggal 21 September 2018).
- Amerta, I Gusti Ngurah Oka, and I Gede Sudjana Budhiasa. 2014. “Pengaruh Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Wisatawan Domestik, Jumlah Hotel Dan Akomodasi Lainnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Badung Tahun 2001-2012.” *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 3 (2).
- Arditia, Reza. 2013. “Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya” 1 (3): 1–26.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi 7. Semarang: Universitas Diponegoro.
- . 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- . 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. 9th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Kepariwisata Nasional
- Karamullah, Fernanda Ayu, and Nur Handayani. 2016. “Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 5 (7).
- Latan, Hengky, and Selva Temalagi. 2008. *Analisis Multivariate Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: BPFE.
- Moningka, Petrus, and Richer Ariani. 2011. “Analisis Realisasi Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado” 10 (1): 40–52.
- Munawir, S. 1997. *Perpajakan*. Edisi keli. Yogyakarta: Liberty.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pariwisata, Dinas. 2013. *Statistik Kepariwisata 2013*. Yogyakarta.
- . 2014. *Statistik Kepariwisata 2014*. Yogyakarta.
- . 2015. *Statistik Kepariwisata 2015*. Yogyakarta.
- . 2016. *Statistik Kepariwisata 2016*. Yogyakarta.

- Pendit, Nyoman S. 1994. *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro
- Pertiwi, Ni Luh Gde Ana. 2014. “Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata Dan PHR Terhadap PAD Kabupaten Gianyar.” *E-Jurnal EP Unud* 3 (3): 115–23.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Pres.
- Rap. 2017. Sistem E-Ticketing Diharapkan Dapat Mencegah Kebocoran Retribusi Wisata. *Tribun Jogja*, October. (<http://jogja.tribunnews.com/2017/10/30/sistem-e-ticketing-diharapkan-dapat-mencegah-kebocoran-retribusi-wisata>, diakses tanggal 21 September 2018).21 September 2018).
- Rozikin, M. Khairur. 2016. “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Dan Jumlah Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Pulau Lombok.” *Repository UMY*.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2011. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sidik, Heri. 2017. Pemkab: Kebocoran Retribusi Wisata Bukan Penyimpangan Petugas. *Antara Yogya*, October. (<https://jogja.antaranews.com/berita/348965/pemkab-kebocoran-retribusi-wisata-bukan-penyimpangan-petugas>, diakses tanggal 21 September 2018).21 September 2018).
- Simanjuntak, Thamrin. 2001. *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah, Bunga Sampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Spillane, James J. 1994. *Ekonomi Pariwisata (Sejarah Dan Prospeknya)*. Cetakan ke. Yogyakarta: Kanisius.
- Suartini, Ni Nyoman, and Made Suyana Utama. 2013. “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gianyar.” *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Sugiyono. 2015a. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- . 2015b. *Statistik Untuk Penelitian*. Cetakan ke. Bandung: Alfabeta.

- Sunarto, and Reni Dyah Ayu Nur Fatimah. 2016. "Pengaruh Penerimaan Retribusi Dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2015." *Jurnal Akuntansi* 4 (2).
- Supangat, Andi. 2008. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi Dan Paeametrik*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Tendean, Jesica Carolina, Sutomo Wim Palar, and Krest Donald Tolosang. 2014. "Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado Melalui Pajak Hotel Sebagai Intervening Variabel." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 1–15.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Widyaningsih, Putu, and Made Kembar Sri Budhi. 2014. "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pendapatan Asli Daerah." *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 3 (4).
- Wijaya, I Gusti Agung Satrya, and I Ketut Djayastra. 2014. "Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Jumlah Tingkat Hunian Hotel, Dan Jumlah Kamar Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, Dan Kota Denpasar Tahun 2001-2010." *E-Jurnal EP Unud*.
- Wijaya, Ida Bagus Agastya Brahmana, and I Ketut Suidiana. 2016. "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran Dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015." *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 5 (12).
- Yoeti, Oka A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.

Lampiran I

Output SPSS

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,933 ^a	,870	,842	72655182254,77	2,281

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	495443314078996000000000,000	3	1651477713596653400000000	31,285	,000 ^b
	Residual	739028571186329950000000,000	14	5278775508473785000000,000		
	Total	569346171197629000000000,000	17			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1313641601,672	43121383217,439		-,030	,976					
	X1	71224,116	21291,142	,663	3,345	,005	,827	,667	,322	,236	4,239
	X2	-7,710	3,905	-,299	-1,975	,068	-,387	-,467	-,190	,404	2,473
	X3	,855	,822	,236	1,040	,316	,874	,268	,100	,181	5,537

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	X1	X2	X3
1	1	2,946	1,000	,02	,01	,01	,01
	2	,878	1,832	,00	,00	,11	,07
	3	,146	4,491	,67	,01	,34	,09
	4	,030	9,835	,31	,99	,54	,84

a. Dependent Variable: Y

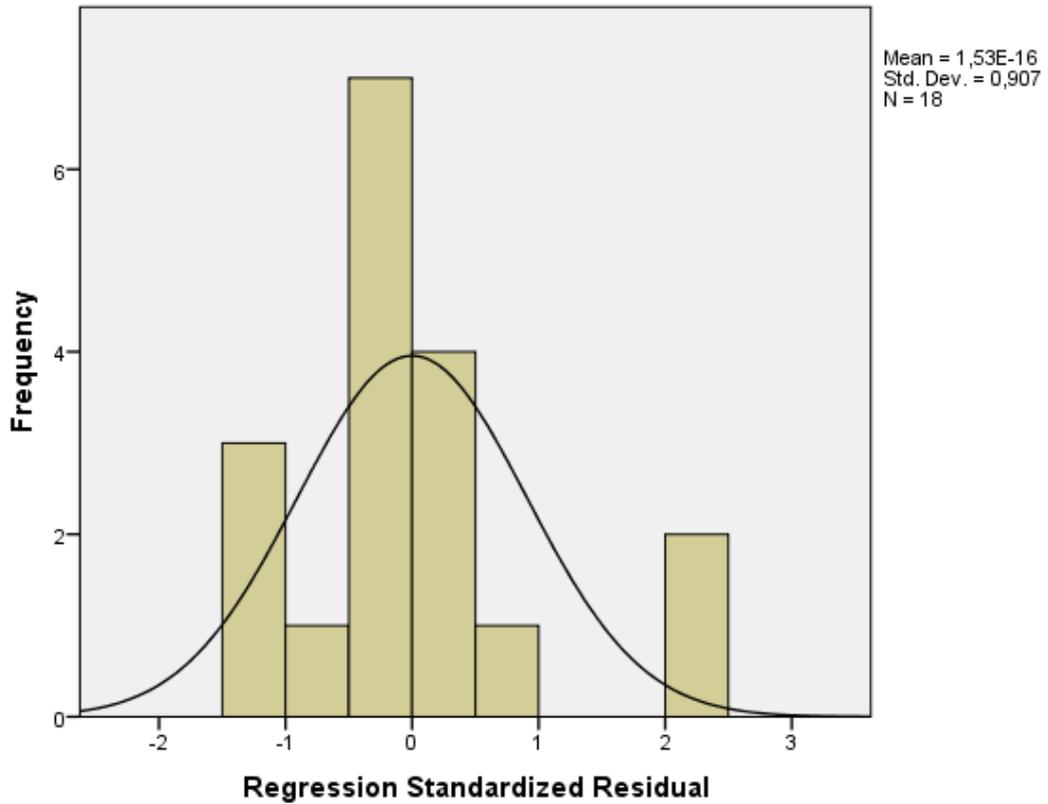
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	32.350.992.384,0000	520.908.537.856,0000	211740081648,9467	170.715.331.348,96817	18
Std. Predicted Value	-1,051	1,811	,000	1,000	18
Standard Error of Predicted Value	20226256896,000	48815304704,000	32946852214,133	9628972088,371	18
Adjusted Predicted Value	-13.315.549,0000	511.926.960.128,0000	210992894519,3649	175.059.294.206,14722	18
Residual	-85.186.879.488,00000	150.481.977.344,00000	,00001	65.933.503.542,06391	18
Std. Residual	-1,172	2,071	,000	,907	18
Stud. Residual	-1,522	2,510	,005	1,046	18
Deleted Residual	-149.114.912.768,00000	221.084.499.968,00000	747.187.129,58173	88.977.780.328,29774	18
Stud. Deleted Residual	-1,606	3,262	,061	1,213	18
Mahal. Distance	,373	6,730	2,833	2,203	18
Cook's Distance	,000	,739	,096	,196	18
Centered Leverage Value	,022	,396	,167	,130	18

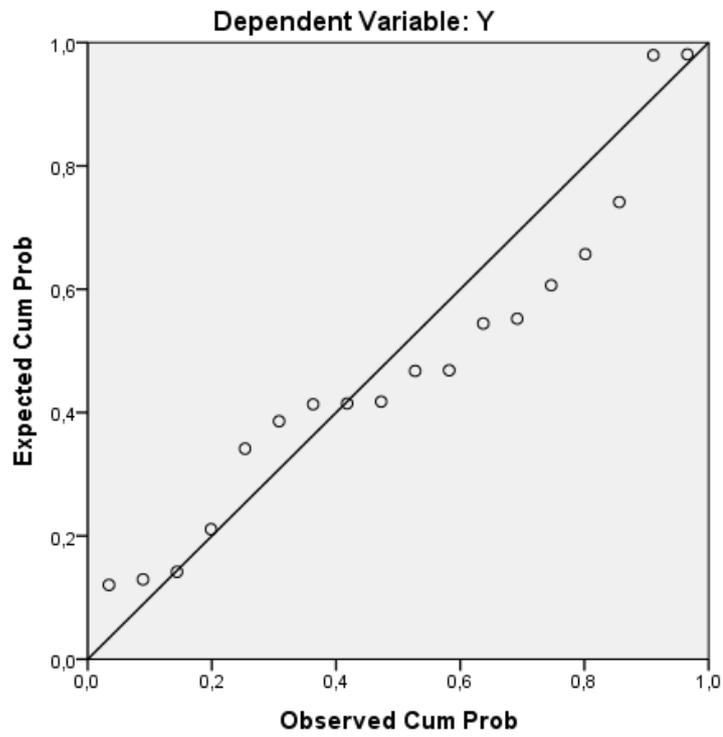
a. Dependent Variable: Y

Histogram

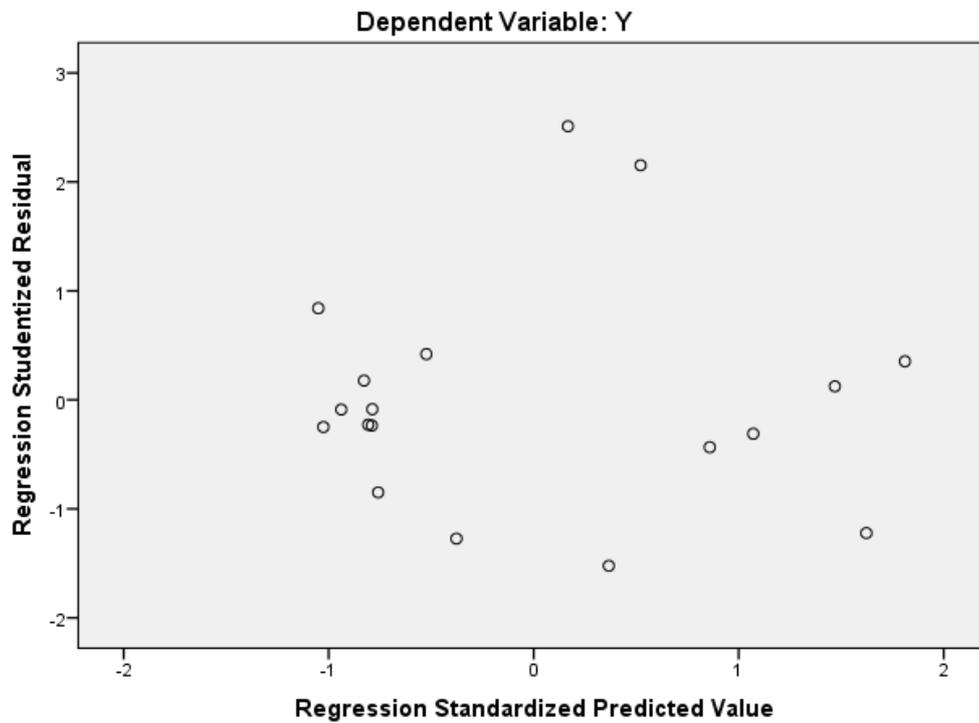
Dependent Variable: Y



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	20	695.850,00	5.942.468,00	3.503.733,7500	1.713.172,19610
X2	18	,00	23.383.852.700,00	7.021.862.023,9444	7097375873,7954
X3	25	431.477.150,00	159.000.000.000,00	46.471.221.300,8000	57331116126,120
Y	25	20.676.786.154,33	718.151.492.310,00	247.933.512.540,0992	198164833115,38
Valid N (listwise)	18				

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		18
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000093
	Std. Deviation	65933503542,06391000
Most Extreme Differences	Absolute	,165
	Positive	,165
	Negative	-,104
Test Statistic		,165
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran II

Data Penelitian Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Data Penelitian Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	Wilayah	X1 (orang)	X2 (Rp)	X3 (Rp)	Y (Rp)
2013	Kota Yogyakarta	4.655.187	TAP	86.799.838.055,00	268.858.750.013,03
	Kab. Bantul	2.057.874	8.906.211.600,00	2.500.000.000,00	71.372.868.679,00
	Kab. Kulon Progo	695.850	1.563.501.500,00	431.477.150,00	20.676.786.154,33
2014	Kab. Gunungkidul	1.822.251	6.118.756.600,00	1.085.000.000,00	23.835.493.993,10
	Kab. Sleman	3.612.954	1.128.272.723,00	62.547.222.536,32	449.270.304.864,83
	Kota Yogyakarta	5.251.352	0,00	105.118.941.727,00	470.641.528.444,03
2015	kab. Bantul	2.708.816	9.607.119.500,00	5.627.251.051,00	151.699.273.281,21
	Kab. Kulon Progo	907.709	1.633.898.000,00	871.741.709,00	45.748.783.410,57
	Kab. Gunungkidul	3.685.137	14.989.421.527,00	2.068.283.098,00	62.168.732.191,86
2016	Kab. Sleman	4.223.031	985.581.500,00	77.780.213.404,94	328.648.925.685,44
	Kota Yogyakarta	5.621.265	TA	121.931.017.493,00	510.548.822.809,51
	Kab. Bantul	4.519.199	11.146.632.500,00	6.599.691.307,00	390.743.330.689,34
2016	Kab. Kulon Progo	1.289.695	2.272.396.000,00	1.021.300.925,50	58.799.238.354,49
	Kab. Gunungkidul	2.648.078	20.436.975.531,00	3.074.383.273,92	79.395.789.964,34
	Kab. Sleman	4.950.934	4.526.405.500,00	91.438.461.041,66	373.483.565.686,02
2016	Kota Yogyakarta	5.520.952	0,00	150.950.199.188,92	540.504.305.181,63
	Kab. Bantul	5.148.633	12.739.875.250,00	8.363.711.247,37	192.281.257.621,40
	Kab. Kulon Progo	1.353.400	2.503.938.000,00	1.384.033.191,20	61.316.804.241,70
2016	Kab. Gunungkidul	3.479.890	23.383.832.700,00	4.881.697.466,00	79.959.060.488,38
	Kab. Sleman	5.942.468	4.450.638.000,00	118.311.384.151,13	410.775.420.749,37

Ket:

- X1 = Jumlah Kunjungan Wisatawan
- X2 = Retribusi Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata
- X3 = Pajak Hotel dan Restoran
- Y = Pendapatan Asli Daerah
- TA = Tidak Ada
- TAP = Tidak Ada Pungutan

Lampiran III

Laporan PAD Kabupaten Bantul 2013

Lampiran III Rancangan Perjabaran APBD
 Nomor :
 Tanggal :

 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.00.00.4	PENDAPATAN	71.372.868.679,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	71.372.868.679,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1	Pajak Daerah	59.042.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01	Pajak Hotel	600.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	275.000.000,00	Berdasarkan Peraturan Kab Bantul No. 08 th 2010 Hotel Bintang Empat, Servon 1 th x 275.000.000,00 = 275.000.000,00 Berdasarkan Peraturan Kab Bantul No. 08 th 2010
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	325.000.000,00	Krakak 1 th x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Berdasarkan Peraturan Kab Bantul No. 08 th 2010 1 th x 31.500.000,00 = 31.500.000,00 Piyungan 1 th x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Servon 1 th x 162.500.000,00 = 162.500.000,00 Kasihan 1 th x 104.000.000,00 = 104.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02	Pajak Restoran	1.900.000.000,00	Berdasarkan Peraturan Kab Bantul No. 08 th 2010
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02.01	Restoran	1.020.000.000,00	Banguntapan 1 th x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Piyungan 1 th x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Servon 1 th x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Kasihan 1 th x 305.000.000,00 = 305.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02.02	Rumah Melati	22.700.000,00	Krakak 1 th x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Bantul 1 th x 10.800.000,00 = 10.800.000,00

Lampiran IV

Laporan PAD Kabupaten Gunungkidul 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20.- OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN LUMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 ORGANISASI : 1.20.05.- DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

1	2	3	4
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1.20.1.20.05.00.00.4.	PENDAPATAN	1.109.889.136.869,10	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	23.835.493.993,10	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH	9.946.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.	Pajak Hotel	30.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.12.	Losmen/Rumah/Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	30.000.000,00	Losmen/Rumah/Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02.	Pajak Restoran	1.055.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02.02.	Rumah Makan	95.000.000,00	Rumah Makan
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02.05.	Katering	960.000.000,00	Rumah makan Katering Katering
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.	Pajak Hiburan	16.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.05.	Pameran	1.750.000,00	Pameran Pameran
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.14.	Balap Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	Balap Kendaraan Bermotor
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.15.	Permainan Keterangsakan	2.500.000,00	Event/Insidental/Road Race Permainan Keterangsakan
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.18.	Pusat Kebugaran	300.000,00	Permainan Keterangsakan Pusat Kebugaran
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.20.	Kolam Renang/Kendaraan wisata	2.500.000,00	Pusat Kebugaran Kolam Renang/Kendaraan wisata
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.21.	Permainan Anak-anak/Jenis hiburan	1.950.000,00	Kolam renang dan kendaraan wisata Permainan Anak-anak/Jenis hiburan
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.04.	Pajak Reklame	600.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.04.01.	Reklame Papan/Bill Board/Videoelectron/megatron	282.000.000,00	Reklame Papan/Bill Board/Videoelectron/megatron
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.04.02.	Reklame Kain	163.000.000,00	Reklame Billboard/vidtron Reklame Kain
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.04.03.	Reklame Melekat/Stiker	1.000.000,00	Reklame kain Reklame Melekat/Stiker
			Reklame melekat/stiker

Lampiran VI

Laporan PAD Kabupaten Sleman 2013

LAMPIRAN I:
PERKABUPATEN SLEMAN
NOMOR 14 x TAHUN 2014
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENCAPAIAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

Pemerintah Kabupaten Sleman
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2013
(SATELIT KONVERSI)
AGLOMERASI

NO. URUT	REKONSILIASI	REALISASI 2012	NET	
1	PENDAPATAN DAERAH	1.734.430.480.348,11	1.295.625.028.822,83	438.805.451.525,28
1.1	Pendapatan Asli Daerah	342.895.881.187,81	465.270.224.824,83	(122.374.343.637,02)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	270.800.900.900,00	314.628.875.550,73	(43.827.974.650,73)
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	20.324.722.320,00	44.651.353.274,10	(24.326.630.954,10)
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Aset Daerah yg Diperoleh	14.333.858.000,00	15.991.824.372,17	(1.657.966.372,17)
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	75.338.101.677,81	111.698.145.281,94	(36.360.043.604,13)
1.2	Pendapatan Transfer	1.423.643.181.151,30	1.462.485.168.257,00	(38.841.987.095,70)
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Pengembangan	882.417.480.816,00	902.792.420.877,00	(20.374.939.061,00)
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	47.223.707.347,00	46.828.174.610,00	395.532.737,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil SDA (SDA)	0,00	748.278.97,00	(748.278.97,00)
1.2.1.3	Dana Bagi Hasil Cukai	2.790.220.980,00	3.112.743.904,00	(322.522.924,00)
1.2.1.4	Dana Alokasi Umum	261.428.812.000,00	291.589.812.000,00	(30.161.000,00)
1.2.1.5	Dana Alokasi Khusus	10.905.330.000,00	30.823.220.000,00	(19.917.890.000,00)
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	218.946.945.000,00	230.512.894.070,00	(11.565.949.070,00)
1.2.2.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	240.810.170.000,00	234.817.271.070,00	5.992.898.930,00
1.2.2.2	Dana Insentif Khusus	32.996.300.000,00	32.996.300.000,00	0,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	154.183.805.280,30	168.788.181.800,00	(14.604.376.519,70)
1.2.3.1	Dana bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Penda Lainnya	125.109.800.200,00	134.451.800.000,00	(9.342.000.000,00)
1.2.3.2	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Penda Lainnya	29.074.005.080,30	34.336.381.800,00	(5.262.376.719,70)
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	7.772.188.720,00	(7.772.188.720,00)
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	1.616.000.000,00	(1.616.000.000,00)
1.3.2	Pendapatan dari utang PDB-P2 yg belum dikembalikan	0,00	6.156.188.720,00	(6.156.188.720,00)
2	BELANJA	5.946.382.382.084,12	5.832.328.287.054,73	114.054.095.029,39
2.1	BELANJA OPERASI	2.864.340.810.337,21	2.822.226.643.224,82	42.114.167.112,39
2.1.1	Belanja Pegawai/Consolidasi	1.181.524.388.818,48	1.224.255.811.420,38	(42.731.422.601,90)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	210.128.006.794,81	227.828.261.688,61	(17.700.254.893,80)
2.1.3	Belanja Perjalanan	144.000.000,00	28.713.800,00	115.286.200,00
2.1.4	Belanja Subsidi	34.745.801.608,00	18.518.987.420,00	16.226.814.188,00
2.1.5	Belanja Hibah	120.410.872.188,00	117.797.222.204,20	2.613.649.983,80
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	28.991.727.000,00	21.851.063.000,00	7.140.664.000,00
2.2	BELANJA TAKWIDUKA	200.990.406.148,00	208.899.888.226,77	(7.909.482.078,77)
2.2.1	Belanja Taksi	30.291.148.000,00	37.110.270.270,00	(6.819.122.270,00)
2.2.2	Belanja Pengoran dan Mekan	50.076.811.200,00	61.820.203.800,00	(11.743.392.600,00)
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	46.436.417.000,00	73.350.676.226,77	(26.914.259.226,77)
2.2.4	Belanja Jalan, Jembatan dan Jembatan	54.599.042.470,00	49.400.128.182,88	5.198.914.287,12
2.2.5	Belanja Alat Tes dan Lainnya	3.232.100.000,00	1.273.252.227,00	1.958.847.773,00
2.3	BELANJA TAKWIDUKA	12.346.168.134,92	0,00	12.346.168.134,92
2.3.1	Belanja Tidak Terutang	12.346.168.134,92	0,00	12.346.168.134,92
2.4	TRANSFER	86.833.277.820,99	86.228.748.880,00	604.528.940,99
2.4.1	Transfer bagi Hasil ke Desa	86.833.277.820,99	86.228.748.880,00	604.528.940,99
2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab.Kota & Penda	33.878.822.820,99	33.348.748.100,00	530.074.720,99
2.4.1.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab.Kota & Penda	34.574.220.000,00	33.142.040.516,80	1.432.179.483,20
2.4.2	Bantuan (Defisit)	(177.841.874.719,02)	209.997.329.820,84	(387.839.193.539,86)
3	PENYAYAN			
3.1	Pencapaian Pembayaran			
3.1.1	Saldo Lebih Pembayaran Anggaran Th Sebelumnya	288.878.874.719,02	288.878.874.719,02	0,00
3.1.2	Pengalihan Pembayaran			
3.1.2.1	Pemindahan Modal	111.000.000.000,00	93.580.000.000,00	17.420.000.000,00
3.1.2.2	Pemindahan Pokok Utang Hutang	178.000.000.000,00	137.748.500.000,00	40.251.500.000,00
3.1.2.3	Pemindahan Lain-lain	177.841.874.719,02	328.362.129.796,82	(150.520.255.077,80)
3.1.3	Pembayaran Netto	177.841.874.719,02	431.329.499.816,82	(253.487.625.100,00)
3.2	SILPA	0,00	431.329.499.816,82	(431.329.499.816,82)

Lampiran VII

Laporan PAD Kota Yogyakarta 2013

URUSAN PEM. ORGANISASI		1.22 - OTONOM DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEDAYAAN DAN PERBANDUAN 1.22.02 - DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN			
KODE REKENING	URAIAN	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH BERSUKUNG (Rp)	DABAR MURUM
1.20 1.20.08 00 00 4	PENDAPATAN	248.471.349,897	266.869.756.013,63	18.387.399.494,03	
1.20 1.20.08 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	248.471.349,897	266.869.756.013,63	18.387.399.494,03	
1.20 1.20.08 00 00 4 1 1	Hasil Pajak Daerah	817.817.473,814	327.749.882.911,06	515.711.617,01,00	
1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01	Pajak Hotel	93.000.000.000	66.154.540.038,00	8.154.510.038,00	17PD No 10011
1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 02	Pajak Restoran	18.100.000.000	18.848.297.027,70	848.297.027,00	17PD No 10011
1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03	Pajak Hiburan	8.800.000.000	7.500.818.737,70	480.818.737,00	17PD No 10011
1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04	Pajak Reklame	8.800.000.000	7.500.399.498,00	300.399.498,00	17PD No 10011
1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	31.000.000.000	31.342.812.298,00	342.812.298,00	17PD No 10011
1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 06	Pajak Parkir	1.285.000.000	1.368.013.877,00	83.013.877,00	17PD No 10011
1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 07	Pajak Air Tanah	1.342.317.211	791.130.184,00	(881.187.027,00)	17PD No 10011
1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 08	Pajak Sengul Burung Walet	8.800.000	7.808.000,00	1.428.000,00	17PD No 10011
1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 09	Pajak Bumi dan Bangunan	42.000.000.000	42.947.474.387,00	397.474.387,00	17PD No 20011
1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	47.453.408.827	50.879.870.237,00	3.196.311.830,00	17PD No 80010
1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 11					
1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.812.402.894	12.896.416.294,77	(16.996.391,23)	
1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 3 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	12.812.402.894	12.896.416.294,77	(16.996.391,23)	KPD No 31876 SPD No 42006
1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 01	PDAM Timanegara	1.094.134.888	1.085.138.378,00	(16.996.193,00)	
1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 02	PD. BPR Bank Jaga	3.138.339.428	3.138.339.408,00	-	SPD DTY No 409
1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 03	Bank Pembangunan Daerah	8.292.238.023	8.292.898.022,83	(1,07)	
1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 04	Perusahaan Bagi Hasil Laba BUKP	81.330.096	81.330.087,84	(8,16)	
1.20 1.20.08 00 00 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Bah	19.841.481.823	28.813.481.207,26	8.871.899.584,26	
1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 01	Hasil Perjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	110.178.808	607.403.000,00	497.224.132,00	77PD No 41988
1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 02	Jasa Gini	1.918.000.000	2.334.818.826,00	416.818.826,00	SPD No 380007
1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 03	Penempatan Bunga Deposito	19.800.000.000	18.105.842.743,78	2.855.812.743,78	SPD No 380007
1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 04	Tuntutan Garansi Kemitraan Daerah	25.899.800	37.898.800,00	12.000.000,00	SPD No 41988
1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 06	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	63.298.958	144.840.738,00	81.251.781,00	
1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 10	Pendapatan dari pengembalian	-	1.793.182.808,00	1.793.182.808,00	
1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 13	Pendapatan dari Asuransi/Claim Perbuatan	-	-	-	
1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 15	Pendapatan Lain-lain	1.127.124.000	4.127.180.184,00	3.010.056.184,00	SPD No 41988
1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 15 03	Denda Hasil Operasi Yustisi	45.614.000	145.185.000,00	99.741.000,00	
1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 15 06	Penarikan Duit Pihak Ke III Yang Bukan Perusahaan Daerah	778.000.000	798.338.990,70	17.398.990,00	
1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 15 10	Sewa Gedung	152.480.000	189.427.000,00	37.947.000,00	
1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 15 14	Lain-lain	150.000.000	3.014.578.874,50	2.864.578.874,50	SPD No 41988
1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 18	Jaminan Sengul	100.000.000	147.706.180,00	47.706.180,00	
1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 23	Sewa Media Reklame	1.900.000.000	1.154.829.037,00	(745.170.963,00)	SPD No 41988
1.20 1.20.08 00 00 5	BELANJA DAERAH	21.820.372.842	19.828.824.278,00	(2.091.548.564,00)	
1.20 1.20.08 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	21.820.372.842	19.828.824.278,00	(2.091.548.564,00)	
1.20 1.20.08 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAL)	12.035.252.898	10.789.109.390,00	(1.246.143.508,00)	
1.20 1.20.08 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	9.785.119.944	9.049.724.988,00	(735.394.956,00)	
1.20 1.20.08 01 00 5 2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.621.810.744	2.402.848.771,00	(218.961.973,00)	
1.20 1.20.08 01 01 5 2	Penyediaan Jasa Buret Menyurat	38.790.000	32.981.204,00	(5.808.796,00)	
1.20 1.20.08 01 01 5 2 1	Belanja Pegawai	38.790.000	32.981.204,00	(5.808.796,00)	
1.20 1.20.08 01 01 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
1.20 1.20.08 01 01 5 2 3	Belanja Modal	1.194.228.000	1.104.716.076,00	(89.511.924,00)	
1.20 1.20.08 01 02 5 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	
1.20 1.20.08 01 02 5 2 1	Belanja Pegawai	1.194.228.000	1.104.716.076,00	(89.511.924,00)	
1.20 1.20.08 01 02 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
1.20 1.20.08 01 02 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
1.20 1.20.08 01 06 5 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	8.985.000	8.017.800,00	(967.200,00)	
1.20 1.20.08 01 06 5 2 1	Belanja Pegawai	8.985.000	8.017.800,00	(967.200,00)	
1.20 1.20.08 01 02 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
1.20 1.20.08 01 06 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

Laporan X

Laporan PAD Kota Yogyakarta 2014

DAUPRAN I
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG PELAJARAN PENTANJUNGAN DAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2014

MINGKASAN PENJABARAN PENTANJUNGAN WABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN JUMLAH (Rp)	REALISASI JUMLAH (Rp)	PERSENTASE/ (BERSISANG) (%)	%
1	PENDAPATAN DAERAH	1.310.102.184.890,00	1.428.743.422.082,81	249.640.248.192,81	19,05
1.1	PENDAPATAN PAD DAERAH	404.272.072,990,00	470.841.128.444,03	66.569.055.454,03	16,45
1.1.1	PAJAK DAERAH	300.582.494,000,00	323.461.182.189,00	22.878.688.189,00	7,62
4.1.1.01	Pajak Hotel	87.675.000,000,00	90.770.200,00	3.095.200,00	3,53
4.1.1.01.01	Hong Hong/Lima	25.055.000,000,00	25.055.000,000,00	0,00	0,00
4.1.1.01.02	Hong Hong/Enam	21.825.000,000,00	19.425.250,000,00	-2.399.750,000,00	-10,99
4.1.1.01.04	Hong Hong/Tiga	18.161.000,000,00	17.508.507,927,00	-652.492,073,00	-3,60
4.1.1.01.05	Hong Hong/Dua	5.759.000,000,00	5.681.752,040,00	-77.247,960,00	-1,34
4.1.1.01.06	Hong Hong/Satu	2.558.000,000,00	1.051,713,000,00	-1.506.287,000,00	-58,92
4.1.1.01.07	Hong Hong/Tiga	1.825.000,000,00	1.753,52,000,00	-71.478,000,00	-3,92
4.1.1.01.08	Hong Hong/Dua	1.725.000,000,00	1.333,82,000,00	-391.178,000,00	-22,68
4.1.1.01.09	Hong Hong/Satu	6.100.000,000,00	6.784,71,000,00	684.710,000,00	11,23
4.1.1.01.11	Lain-lain/Pajak Peningkatan Perumahan/Perumahan Kota	462.111,000,00	543,29,542,00	81.188,542,00	17,57
4.1.1.02	Pajak Restoran	22.232.000,000,00	24.411.654.427,00	2.179.654.427,00	9,80
4.1.1.02.01	Restoran	22.200.000,000,00	24.408,57,127,00	2.208.571,27,00	9,95
4.1.1.02.05	Kawling	32.000,000,000,00	3.093,100,00	2.961,100,00	9,25
4.1.1.03	Pajak Hiburan	7.450.000,000,00	8.254.105.231,00	804.105.231,00	10,74
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Video	2.900.000,000,00	2.217,57,274,00	-682.422,726,00	-23,53
4.1.1.03.06	Disco/Club	300.000,000,00	878,61,111,00	578,61,111,00	192,87
4.1.1.03.07	Karaoke	100.000,000,00	189,25,424,00	89,25,424,00	89,25
4.1.1.03.10	Pertunjukan Sitar	61.000,000,00	320,00,000,00	259,00,000,00	424,61
4.1.1.03.15	Pertunjukan Maringman	714.000,000,00	1.123,25,725,00	409,25,725,00	57,32
4.1.1.03.18	Pada Kembang	1.000.000,000,00	1.114,9,50,000,00	114,9,50,000,00	11,49
4.1.1.03.20	KRUC Samudra Lela	1.150.000,000,00	1.148,7,51,200,00	-2,488,800,00	-0,21
4.1.1.03.22	Indohati	110.000,000,00	63,1,57,500,00	-46,422,500,00	-42,19
4.1.1.03.23	Lain-lain Pertunjukan	250.000,000,00	228,87,070,00	-21,129,930,00	-8,47
4.1.1.03.24	Sesawen	25.000,000,00	19,00,000,00	-6.000,000,00	-24,00

Lampiran XI

Laporan PAD Kabupaten Kulon Progo 2014

451



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan : 1. 20
 Unit Organisasi : 1. 20. 05
 Sub Unit Organisasi : 1. 20. 05. 01

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemeliharaan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangket Daerah, Kepegawaian dan Personalia : 1. 20. 05
 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset : 1. 20. 05. 01
 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset : 1. 20. 05. 01

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
1. 20. 1. 20. 05. 4	PENDAPATAN	40.429.526.827,75	45.748.783.410,57	5.319.256.582,82
1. 20. 1. 20. 05. 4. 1	PENDAPATAN ASU DAERAH	40.429.526.827,75	45.748.783.410,57	5.319.256.582,82
1. 20. 1. 20. 05. 4. 1. 00. 00. 1	Pendapatan Pajak Daerah	20.447.388.861,66	21.171.477.417,00	724.088.555,34
1. 20. 1. 20. 05. 4. 1. 00. 00. 1. 01	Pajak Hotel	82.250.000,00	76.604.150,00	(5.645.850,00)
1. 20. 1. 20. 05. 4. 1. 00. 00. 1. 01. 09	Hotel Merah Satu	16.000.000,00	12.975.000,00	(3.024.000,00)
1. 20. 1. 20. 05. 4. 1. 00. 00. 1. 01. 12	Losmen Rumah Pernapasan/Pesanggraha/Hotel/Rumah Kos	66.250.000,00	63.628.150,00	(2.621.850,00)
1. 20. 1. 20. 05. 4. 1. 00. 00. 1. 02	Pajak Restoran	505.445.000,00	795.137.589,00	289.692.589,00
1. 20. 1. 20. 05. 4. 1. 00. 00. 1. 02. 02	Rumah Makan	299.750.000,00	454.232.155,00	154.481.655,00
1. 20. 1. 20. 05. 4. 1. 00. 00. 1. 02. 05	Katering	205.695.000,00	340.905.404,00	135.210.404,00
1. 20. 1. 20. 05. 4. 1. 00. 00. 1. 03	Pajak Hiburan	7.725.000,00	6.796.000,00	(929.000,00)
1. 20. 1. 20. 05. 4. 1. 00. 00. 1. 03. 02	Pelayanan Kesehatan/Musik/Tari/Busana	1.448.000,00	570.000,00	(878.000,00)
1. 20. 1. 20. 05. 4. 1. 00. 00. 1. 03. 05	Pameran	4.552.400,00	6.226.000,00	1.673.600,00

451

Lampiran XII

Laporan PAD Kabupaten Sleman 2014

**RINCIAN LAPORAN REALISASI APBD
TAHUN ANGGARAN 2014 S/D BULAN DESEMBER
BERDASARKAN REKENING PENDAPATAN DAN BELANJA**

halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
1.20	URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,	284.500.000.000,00	328.648.925.685,44	115,52	44.148.925.685,44
1.20.75	Dinas Pendapatan Daerah	284.500.000.000,00	328.648.925.685,44	115,52	44.148.925.685,44
1.20.75.4	Pendapatan	284.500.000.000,00	328.648.925.685,44	115,52	44.148.925.685,44
1.20.75.4.1.1	Hasil Pajak Daerah	282.100.000.000,00	326.033.995.236,66	115,57	43.933.995.236,66
1.20.75.4.1.1.01	Pajak Hotel	45.000.000.000,00	49.800.597.180,77	110,67	4.800.597.180,77
1.20.75.4.1.1.01.01	Pajak Hotel Bintang dan Melati	45.000.000.000,00	49.800.597.180,77	110,67	4.800.597.180,77
1.20.75.4.1.1.02	Pajak Restoran	23.000.000.000,00	27.979.616.224,17	121,65	4.979.616.224,17
1.20.75.4.1.1.02.01	Pajak Restoran	23.000.000.000,00	27.979.616.224,17	121,65	4.979.616.224,17
1.20.75.4.1.1.03	Pajak Hiburan	5.000.000.000,00	5.652.846.660,64	113,06	652.846.660,64
1.20.75.4.1.1.03.01	Pajak Hiburan	5.000.000.000,00	5.652.846.660,64	113,06	652.846.660,64
1.20.75.4.1.1.04	Pajak Reklame	10.000.000.000,00	11.367.611.231,00	113,68	1.367.611.231,00
1.20.75.4.1.1.04.01	Pajak Reklame	10.000.000.000,00	11.367.611.231,00	113,68	1.367.611.231,00
1.20.75.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	55.000.000.000,00	60.121.472.627,00	109,31	5.121.472.627,00
1.20.75.4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan	55.000.000.000,00	60.121.472.627,00	109,31	5.121.472.627,00
1.20.75.4.1.1.07	Pajak Parkir	1.100.000.000,00	1.265.723.053,62	115,07	165.723.053,62
1.20.75.4.1.1.07.01	Pajak Parkir	1.100.000.000,00	1.265.723.053,62	115,07	165.723.053,62
1.20.75.4.1.1.08	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	2.042.167.036,46	102,11	42.167.036,46
1.20.75.4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	2.042.167.036,46	102,11	42.167.036,46
1.20.75.4.1.1.11	Pajak BPHTB	80.000.000.000,00	95.980.352.191,00	119,98	15.980.352.191,00
1.20.75.4.1.1.11.01	Pajak BPHTB	80.000.000.000,00	95.980.352.191,00	119,98	15.980.352.191,00
1.20.75.4.1.1.12	Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan	8.000.000.000,00	12.205.938.250,00	152,57	4.205.938.250,00
1.20.75.4.1.1.12.01	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.000.000.000,00	12.205.938.250,00	152,57	4.205.938.250,00
1.20.75.4.1.1.13	Pajak Bumi dan Bangunan	53.000.000.000,00	59.617.670.782,00	112,49	6.617.670.782,00
1.20.75.4.1.1.13.01	pajak Bumi dan Bangunan	53.000.000.000,00	59.617.670.782,00	112,49	6.617.670.782,00
1.20.75.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.400.000.000,00	2.614.930.448,78	108,96	214.930.448,78
1.20.75.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.400.000.000,00	2.614.930.448,78	108,96	214.930.448,78
1.20.75.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	400.000.000,00	203.735.948,78	50,93	(196.264.051,22)
1.20.75.4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.000.000.000,00	2.411.194.500,00	120,56	411.194.500,00

Lampiran XIII

Laporan PAD Kabupaten Bantul 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. W. Mangrove Bantul, Telfax (0274) 67260 Kode Pos 55711
http://dipad.bantul.go.id Email: dipad@bantul.kab.go.id

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015
BULAN DESEMBER



Hal: 1

Rekening Pendapatan	Target	Penerimaan		Realisasi	
		aid Bulan Lalu	Bulan Ini	aid Bulan Ini	Realisasi
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	1.914.132.490.836,67	1.845.564.558.305,95	105.777.517.015,28	1.951.342.075.321,23	101,94
SUB TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH	335.870.098.730,39	353.728.880.616,06	37.014.350.073,28	390.743.330.689,34	116,34
SUB TOTAL DANA PERMBAANGAN	1.054.209.674.000,00	1.024.710.402.674,00	17.132.058.400,00	1.041.842.461.074,00	98,83
SUB TOTAL LAIN LAIN PENERIMAAN DAERAH YANG SAH	524.052.518.106,28	467.125.175.015,89	51.631.106.542,00	518.756.203.557,89	98,99
PENDAPATAN ASLI DAERAH	335.870.098.730,39	353.728.880.616,06	37.014.350.073,28	390.743.330.689,34	116,34
Hasil Pajak Daerah	93.709.629.500,00	112.024.183.236,63	11.281.701.448,00	123.305.884.694,63	131,58
Pajak Hotel	1.001.000.000,00	1.150.228.986,50	119.477.535,00	1.269.706.521,50	126,64
4.1.1.01.01.00 Hotel Bintang Lima Berlian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.02.00 Hotel Bintang Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.03.00 Hotel Bintang Empat	423.800.000,00	431.735.045,00	70.206.604,00	501.941.649,00	118,44
4.1.1.01.03.01 Pajak Hotel Bintang Empat Swandikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.03.02 Pajak Hotel Bintang Empat Sanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.03.03 Pajak Hotel Bintang Empat Krikk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.03.04 Pajak Hotel Bintang Empat Puntong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.03.05 Pajak Hotel Bintang Empat Bambang Ligo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.03.06 Pajak Hotel Bintang Empat Pancok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.03.07 Pajak Hotel Bintang Empat Pejangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.03.08 Pajak Hotel Bintang Empat Bantul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.03.09 Pajak Hotel Bintang Empat Jetis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.03.10 Pajak Hotel Bintang Empat Imogiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.03.11 Pajak Hotel Bintang Empat Dlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.03.12 Pajak Hotel Bintang Empat Banguntapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.03.13 Pajak Hotel Bintang Empat Piyungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.03.14 Pajak Hotel Bintang Empat Sewon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.03.15 Pajak Hotel Bintang Empat Sreng	423.800.000,00	431.735.045,00	70.206.604,00	501.941.649,00	118,44

(Lanjutan...)

Hal. 2

Rekening Pendapatan	Target	Penerimaan			Realisasi
		sid Bulan Lalu	Bulan Ini	sid Bulan Ini	
4.1.01.03.16 Pajak Hotel Bintang Empat Karahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.01.03.17 Pajak Hotel Bintang Empat Sedayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.01.04.01 Hotel Bintang Tiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.01.05.00 Hotel Bintang Dua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.01.06.00 Hotel Bintang Satu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.01.07.00 Hotel Melati Tiga	577.200.000,00	716.493.941,50	49.270.931,00	767.764.872,50	133,02
4.1.01.07.01 Pajak Hotel Melati Tiga Srandakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.01.07.02 Pajak Hotel Melati Tiga Sandon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.01.07.03 Pajak Hotel Melati Tiga Kretak	7.500.000,00	7.342.000,00	687.000,00	8.029.000,00	107,05
4.1.01.07.04 Pajak Hotel Melati Tiga Pundong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.01.07.05 Pajak Hotel Melati Tiga Bembang Lipuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.01.07.06 Pajak Hotel Melati Tiga Pandak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.01.07.07 Pajak Hotel Melati Tiga Palajaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.01.07.08 Pajak Hotel Melati Tiga Bentul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.01.07.09 Pajak Hotel Melati Tiga Jeds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.01.07.10 Pajak Hotel Melati Tiga Imogit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.01.07.11 Pajak Hotel Melati Tiga Dlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.01.07.12 Pajak Hotel Melati Tiga Banguntapan	95.000.000,00	111.869.559,00	12.519.364,00	124.408.923,00	130,96
4.1.01.07.13 Pajak Hotel Melati Tiga Prien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.01.07.14 Pajak Hotel Melati Tiga Pyungan	14.700.000,00	15.570.000,00	995.000,00	16.565.000,00	112,69
4.1.01.07.15 Pajak Hotel Melati Tiga Sewon	330.000.000,00	409.124.820,00	18.946.928,00	428.071.748,00	129,72
4.1.01.07.16 Pajak Hotel Melati Tiga Kasihan	130.000.000,00	174.567.562,50	16.122.639,00	190.690.201,50	146,68
4.1.01.07.17 Pajak Hotel Melati Tiga Sedayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.01.08.00 Hotel Melati Dua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.01.09.01 Hotel Melati Satu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.01.10.01 Motel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.01.11.00 Cottage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.01.12.00 LomponRumahan PengnepanPesanograhianRumahan Kos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.01.13.00 Wiensia Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.01.14.00 Gubuk Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

(lanjutan...)

Hal: 3

Rekening Pendapatan	Target	Penerimaan			Realisasi
		sid Bulan Lalu	Bulan Ini	sid Bulan Ini	
Pajak Restoran	3.500.000.000,00	4.403.395.359,50	926.589.426,00	5.329.984.785,50	152,29
4.1.1.02.01.00 Restoran	1.555.000.000,00	1.893.363.856,50	123.025.787,00	2.016.389.643,50	129,67
4.1.1.02.01.01 Pajak Restoran Srandakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.01.02 Pajak Restoran Sanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.01.03 Pajak Restoran Kerek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.01.04 Pajak Restoran Pundong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.01.05 Pajak Restoran Bambang Lipuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.01.06 Pajak Restoran Pandak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.01.07 Pajak Restoran Pajangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.01.08 Pajak Restoran Bantul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.01.09 Pajak Restoran Jetis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.01.10 Pajak Restoran Imogin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.01.11 Pajak Restoran Dingsri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.01.12 Pajak Restoran Banguntapan	800.000.000,00	929.488.259,00	41.820.055,00	971.308.314,00	121,41
4.1.1.02.01.13 Pajak Restoran Peret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.01.14 Pajak Restoran Piyungan	104.300.000,00	133.101.268,50	12.219.775,00	145.321.063,50	139,33
4.1.1.02.01.15 Pajak Restoran Sewon	250.700.000,00	316.714.208,00	29.596.348,00	342.309.657,00	136,54
4.1.1.02.01.16 Pajak Restoran Kasihan	400.000.000,00	514.080.101,00	43.390.608,00	557.450.709,00	139,36
4.1.1.02.01.17 Pajak Restoran Sedayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.02.00 Rumah Makan	62.800.000,00	89.866.500,00	7.875.000,00	77.833.500,00	123,94
4.1.1.02.02.01 Pajak Rumah Makan Srandakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.02.02 Pajak Rumah Makan Sanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.02.03 Pajak Rumah Makan Kerek	10.300.000,00	10.310.000,00	910.000,00	11.220.000,00	108,93
4.1.1.02.02.04 Pajak Rumah Makan Pundong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.02.05 Pajak Rumah Makan Bambang Lipuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.02.06 Pajak Rumah Makan Pandak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.02.07 Pajak Rumah Makan Pajangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.02.08 Pajak Rumah Makan Bantul	38.000.000,00	40.893.500,00	4.876.000,00	45.571.500,00	119,93
4.1.1.02.02.09 Pajak Rumah Makan Jetis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.02.10 Pajak Rumah Makan Imogin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

(Lanjutan...)

Hal 4

Rekening Pendapatan	Target	Penerbitan			Realisasi
		sid Bulan Lalu	Bulan Ini	sid Bulan Ini	
4.1.1.02.02.11 Pajak Rumah Mekan Dinggo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.02.12 Pajak Rumah Mekan Banguntapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.02.13 Pajak Rumah Mekan Pleret	14.500.000,00	18.755.000,00	2.287.000,00	21.042.000,00	145,12
4.1.1.02.02.14 Pajak Rumah Mekan Piyungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.02.15 Pajak Rumah Mekan Sewon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.02.16 Pajak Rumah Mekan Kasihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.02.17 Pajak Rumah Mekan Sedayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.03.00 Kalitirata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.04.00 Klaten	1.869.207.000,00	2.421.549.903,00	794.044.639,00	3.215.594.542,00	172,03
4.1.1.02.05.00 Klateng	12.953.000,00	19.523.100,00	1.644.000,00	20.167.100,00	155,22
4.1.1.02.06.00 Wonorejo	1.500.000,00	1.746.500,00	40.000,00	1.786.500,00	119,10
4.1.1.02.06.01 Pajak Warung Srandakan	600.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	128,33
4.1.1.02.06.02 Pajak Warung Sanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.06.03 Pajak Warung Kroyok	600.000,00	918.000,00	0,00	918.000,00	153,00
4.1.1.02.06.04 Pajak Warung Pundong	1.800.000,00	2.055.000,00	660.000,00	2.715.000,00	150,83
4.1.1.02.06.05 Pajak Warung Bambang Lipuro	2.100.000,00	2.594.100,00	0,00	2.594.100,00	123,53
4.1.1.02.06.06 Pajak Warung Pendak	2.100.000,00	2.563.000,00	600.000,00	3.153.000,00	150,14
4.1.1.02.06.07 Pajak Warung Pajangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.06.08 Pajak Warung Bantul	496.000,00	542.000,00	82.500,00	624.500,00	126,16
4.1.1.02.06.09 Pajak Warung Jiris	800.000,00	892.500,00	88.500,00	981.000,00	122,63
4.1.1.02.06.10 Pajak Warung Imogit	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	100,00
4.1.1.02.06.11 Pajak Warung Dinggo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.06.12 Pajak Warung Banguntapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.06.13 Pajak Warung Pleret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.06.14 Pajak Warung Piyungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.06.15 Pajak Warung Sewon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.06.16 Pajak Warung Kasihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.06.17 Pajak Warung Sedayu	2.800.000,00	6.254.000,00	173.000,00	6.427.000,00	229,54
4.1.1.02.07.00 Bier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1.02.08.00 Jasa Boga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Lampiran XIV

Laporan PAD Kabupaten Gunungkidul 2015

URUSAN PEMBIYAHAN : 1.10 - OTONOMI DAERAH, PEMBIYAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PEMBERANGKAT DAERAH, KEPERAWALAN DAN PERSANDIAN
 ORGANISASI : 1.20.05 - DINAS PENDAMPINGAN, PENGELOAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

KODE REKENING	URUSAN	JUMLAH (Rp.)			%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	5	
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.05.00.00.4	PENDAPATAN	1.468.319.857.439,36	1.462.302.140.864,79	13.772.833.423,13	0,94
1.20.1.20.05.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	38.407.340.423,36	79.395.789.894,34	21.986.548.540,78	46,79
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1	Hasil Pajak Daerah	29.334.630.000,00	26.178.335.921,92	6.643.803.213,92	22,69
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01	Pajak Hotel	134.430.000,00	101.104.121,00	101.104.121,00	74,71
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.04	Hotel Bintang Tiga	90.850.000,00	18.018.832,00	32.286.611,00	33,72
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05	Hotel Bintang Empat	43.580.000,00	1.169.800,00	69.417.500,00	15,93
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02	Pajak Hiburan	2.084.400.000,00	2.837.737.020,92	731.337.020,92	35,14
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.01	Rakor	-	6.462.000,00	9.450.000,00	146,08
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.02	Ruang Hiburan	24.400.000,00	250.351.000,00	6.130.000,00	2,52
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.03	Klubing	1.400.000,00	1.400.000,00	200.000,00	14,29
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.04	Pajak Hiburan	19.790.000,00	33.148.830,00	23.398.830,00	78,84
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.05	Pajak Hiburan (Musk)	11.400.000,00	2.920.000,00	12.250.000,00	107,46
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.06	Shila Arabid Sulap	-	20.200.000,00	20.200.000,00	100,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.07	Sala Nelayan Samudra	1.000.000,00	101.800,00	101.800,00	10,18
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.08	Pajak Hiburan	200.000,00	200.000,00	11.000,00	5,50
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.09	Klub Nelayan Samudra	4.000.000,00	5.433.300,00	4.422.300,00	11,06
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.10	Pemanan Arak (Panc Hibura)	11.000.000,00	14.967.000,00	12.110.000,00	11,02
1.20.1.20.05.00.4.1.1.04	Pajak Rekreasi	800.000.000,00	613.861.130,00	113.861.130,00	14,47
1.20.1.20.05.00.4.1.1.04.01	Rakor (Musk) Hiburan	11.000.000,00	412.101.700,00	100.100.700,00	22,09
1.20.1.20.05.00.4.1.1.04.02	Rakor (Musk) Hiburan	40.000.000,00	36.424.000,00	37,000,00	0,94
1.20.1.20.05.00.4.1.1.04.03	Rakor (Musk) Hiburan	1.000.000,00	87.300,00	87.300,00	8,73
1.20.1.20.05.00.4.1.1.04.04	Rakor (Musk) Hiburan	30.000.000,00	106.47.000,00	20.427.000,00	68,12
1.20.1.20.05.00.4.1.1.04.05	Rakor (Musk) Hiburan	1.000.000,00	14.840.000,00	14.840.000,00	1,48
1.20.1.20.05.00.4.1.1.04.06	Rakor (Musk) Hiburan	30.000.000,00	33.567.000,00	27.000,00	0,09
1.20.1.20.05.00.4.1.1.04.07	Rakor (Musk) Hiburan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
1.20.1.20.05.00.4.1.1.05	Pajak Pemungutan	9.180.000.000,00	9.738.490.817,00	498.490.817,00	5,43
1.20.1.20.05.00.4.1.1.05.01	Pajak Pemungutan (Musk)	6.140.000,00	9.738.490,817,00	498.490,817,00	8,13
1.20.1.20.05.00.4.1.1.05.02	Pajak Pemungutan (Musk)	898.000.000,00	781.000.000,00	898.000,000,00	99,89
1.20.1.20.05.00.4.1.1.05.03	Suku Nelay	174.900.000,00	411.800.000,00	36.100.000,00	20,65
1.20.1.20.05.00.4.1.1.05.04	Suku Nelay	200.000,00	200.000,00	46.200,00	23,10
1.20.1.20.05.00.4.1.1.05.05	Pajak Hiburan	30.000.000,00	18.000.000,00	13.100.000,00	43,67
1.20.1.20.05.00.4.1.1.05.10	Tenda Hiburan	300.000,00	300.000,00	240.000,00	80,00

1.20.05 - DINAS PENDAMPINGAN, PENGELOAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH - 1072 -

Lampiran XVII

Laporan PAD Kabupaten Sleman 2015

Kode Rekening	Uraian	Jumlah [R]
1	2	3
URUSAN PEMERINTAHAN :		
ORGANISASI :		
1.20 - Otonomi Daerah		
Umum, Administrasi		
1.20.28 - DINAS PEN		
1.20	URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN	346.100.000.000,00
1.20.1.20.28.00.4	Pendapatan Daerah	346.100.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.001	Pendapatan	346.100.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.001.411	Pajak Daerah	346.000.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.001.411.01	Pajak Hotel	46.000.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.001.411.0101	Pajak Hotel	46.000.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.001.411.02	Pajak Restoran	36.000.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.001.411.0201	Pajak Restoran	36.000.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.001.411.03	Pajak Hiburan	7.000.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.001.411.0301	Pajak Hiburan	7.000.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.001.411.04	Pajak Reklame	8.500.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.001.411.0401	Pajak Reklame	8.500.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.001.411.05	Pajak Penerangan Jalan	70.000.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.001.411.0501	Pajak Penerangan Jalan PLN	70.000.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.001.411.07	Pajak Parkir	1.500.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.001.411.0701	Pajak Parkir	1.500.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.001.411.08	Pajak Air Bawah Tanah	2.000.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.001.411.0801	Pajak Air Bawah Tanah	2.000.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.001.411.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.001.411.1101	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.001.411.12	Pajak Bumi dan Bangunan	60.000.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.001.411.1201	Pajak Bumi dan Bangunan	60.000.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.001.411.13	Pajak BPHTB	110.000.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.001.411.1301	Pajak BPHTB	110.000.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.001.412	Retribusi Daerah	100.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.001.412.02	Retribusi Jasa Usaha	100.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.001.412.0201	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.001.414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0
1.20.1.20.28.00.00.001.414.07	Pendapatan Denda Pajak1)	0
1.20.1.20.28.00.00.001.414.0701	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0
1.20.1.20.28.00.00.001.414.0702	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0

Lampiran XVIII

Laporan PAD Kabupaten Bantul 2016

Lampiran III ANGGARAN PELAYANAN BUNTI KABUPATEN BANTUL
 TINGKAS KEKABUPATEN BERTANGGUNGJAWABAN SELURUSANNYA
 TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor : Tahun 2017
 Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016

Usaha (Wajib) Daerah, Pemeliharaan Umum, Jasa Mula, Pengabdian Masyarakat
 Dana Pembiayaan Kabupaten/Kabupaten dan Mnt Daerah
 Dana Pembiayaan Kabupaten/Kabupaten dan Mnt Daerah

KODE REKONSILIASI	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		REKONSILIASI		SISWA (Rp.)		SISWA (%)	
		ANGGARAN	DETERMINASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	PENDAPATAN	102.666.662.180,23	102.666.662.180,23	102.666.662.180,23	102.666.662.180,23	102.666.662.180,23	102,666.662.180,23	100,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.666.662.180,23	102.666.662.180,23	102.666.662.180,23	102.666.662.180,23	102.666.662.180,23	102,666.662.180,23	100,00	
4.1.00.00.1	Pendapatan Asli Daerah	102.666.662.180,23	102.666.662.180,23	102.666.662.180,23	102.666.662.180,23	102.666.662.180,23	102,666.662.180,23	100,00	
4.1.00.00.1.01	Pajak Hibah	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	11,500.000.000,00	11,500.000.000,00	11,500.000.000,00	100,00	
4.1.00.00.1.01.01	Hibah Bering Bangun	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	
4.1.00.00.1.01.01.01	Hibah (Mandi Tiga)	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	
4.1.00.00.1.01.01.01.01	Layanan Rumah	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
4.1.00.00.1.01.01.01.01.01	Pembangunan/Perbaikan/Instansi/Rumah Sda	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
4.1.00.00.1.01.01.01.01.01.01	Pajak Hibah	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	100,00	
4.1.00.00.1.01.01.01.01.01.01.01	Rakitan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
4.1.00.00.1.01.01.01.01.01.01.01.01	Rumah Hibah	15.175.000,00	15.175.000,00	15.175.000,00	15.175.000,00	15.175.000,00	15.175.000,00	100,00	
4.1.00.00.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Kebijakan	2.774.324.000,00	2.774.324.000,00	2.774.324.000,00	2,774.324.000,00	2,774.324.000,00	2,774.324.000,00	100,00	
4.1.00.00.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Warung	56.624.000,00	56.624.000,00	56.624.000,00	56.624.000,00	56.624.000,00	56.624.000,00	100,00	
4.1.00.00.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pajak Hibah	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	
4.1.00.00.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pemasaran	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	
4.1.00.00.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pemasaran Kabupaten	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	
4.1.00.00.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pajak Hibah/Instansi	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	
4.1.00.00.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pajak Hibah/Instansi/Perbaikan/Changga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
4.1.00.00.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Zonasi	441.400.000,00	441.400.000,00	441.400.000,00	441.400.000,00	441.400.000,00	441.400.000,00	100,00	
4.1.00.00.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pajak Hibah	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	100,00	
4.1.00.00.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Sarana Prasarana/Instansi/Instansi/Instansi	1.820.800.120,00	1.820.800.120,00	1.820.800.120,00	1.820.800.120,00	1.820.800.120,00	1.820.800.120,00	100,00	
4.1.00.00.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Sarana Lain	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	
4.1.00.00.1.01	Sarana Hibah/Instansi	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	
4.1.00.00.1.01	Sarana Kabupaten	8.142.250,00	8.142.250,00	8.142.250,00	8.142.250,00	8.142.250,00	8.142.250,00	100,00	
4.1.00.00.1.01	Sarana Kabupaten	14.000.750,00	14.000.750,00	14.000.750,00	14.000.750,00	14.000.750,00	14.000.750,00	100,00	
4.1.00.00.1.01	Pajak Hibah/Instansi/Lain	10.750.000.000,00	10.750.000.000,00	10.750.000.000,00	10.750.000.000,00	10.750.000.000,00	10.750.000.000,00	100,00	
4.1.00.00.1.01	Pajak Hibah/Instansi/Lain/Instansi	10.750.000.000,00	10.750.000.000,00	10.750.000.000,00	10.750.000.000,00	10.750.000.000,00	10.750.000.000,00	100,00	
4.1.00.00.1.01	Pajak Hibah/Instansi/Lain/Instansi/Instansi	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	

Lampiran XIX

Laporan PAD Kota Yogyakarta 2016

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PENUBUNGAN DAN PENGANGGARAN BELANJA DAN PENGADAAN BARANG DAN JASADAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

MINGGUKAN LAPORAN MELAKUKAI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2016

KODE REVENUS	URSAH	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH (BERKURANG)	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	RELEAS			
1	PENDAPATAN DASAR	15.923.048.914,00	1.577.679.932.942,00	(1.561.756.884,00)	9,809	
1.1	PENDAPATAN ASLI DASAR	9.133.407.413.639,00	946.304.303.181,03	25.138.091.533,03	10,468	
1.1.1	PAJAK POKOK	2.262.950.000.000,00	224.077.894.040,92	7.207.984.040,92	10,221	
4.1.1.01	Pajak Hotel	1.120.000.000.000,00	114.266.026.111,92	2.903.026.111,92	10,206	
4.1.1.01.01	Hotel 5 bintang/lima	38.000.000.000,00	2.754.714.462,91	(63.245.285,09)	98,38	
4.1.1.01.02	Hotel 4 bintang/empat	34.000.000.000,00	2.244.377.744,00	(55.622.256,00)	97,73	
4.1.1.01.04	Hotel 3 bintang/tiga	14.000.000.000,00	2.228.212.817,00	3.092.212.817,00	1,004	
4.1.1.01.05	Hotel 2 bintang/dua	14.000.000.000,00	1.432.172.833,00	25.727.833,00	1,002	
4.1.1.01.06	Hotel 1 bintang/satu	7.000.000.000,00	4.541.287.658,00	(2.458.712.342,00)	60,58	
4.1.1.01.07	Hotel/Resor/Spa	1.000.000.000,00	1.641.941.076,00	1.421.941.076,00	1,003	
4.1.1.01.08	Hotel/Resor/Spa/Club	1.000.000.000,00	1.477.349.238,00	(22.650.462,00)	97,78	
4.1.1.01.09	Hotel/Resor/Spa	9.000.000.000,00	1.075.487.813,00	1.075.487.813,00	1,110	
4.1.1.01.11	Lotteri (Rencana Pengadaan) (Pembangunan) (Rencana Kota	500.000.000,00	551.137.933,00	51.137.933,00	1,023	
4.1.1.02	Pajak Rendahan	34.000.000.000,00	26.645.154.077,00	264.124.077,00	10,778	
4.1.1.02.01	Rendahan	33.875.000.000,00	26.598.884.033,00	2.614.840.033,00	1,0770	
4.1.1.02.02	Kontribusi	25.000.000,00	25.296.054,00	292.804,00	2,112	

Lampiran XXI

Laporan PAD Kabupaten Sleman 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI :		1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan	
1.20.16 - DINAS PENDAPATAN DAERAH		Jumlah (Rp)	
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi
1	2	3	4
1.20	URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN	383.642.357.998,77	410.779.340.749,37
1.20.1.20.16.00.4	Pendapatan Daerah	383.642.357.998,77	410.775.420.749,37
1.20.1.20.16.00.0001	PENDAPATAN	383.642.357.998,77	410.775.420.749,37
1.20.1.20.16.00.0001.411	Pajak Daerah	383.400.000.000,00	407.675.230.792,56
1.20.1.20.16.00.0001.41101	Pajak Hotel	60.000.000.000,00	67.229.561.319,89
1.20.1.20.16.00.0001.4110102	Pajak Hotel Bintang Lima	22.830.482.542,00	24.605.659.747,00
1.20.1.20.16.00.0001.4110103	Pajak Hotel Bintang Empat	24.766.482.168,00	23.131.951.428,28
1.20.1.20.16.00.0001.4110104	Pajak Hotel Bintang Tiga	7.250.484.143,00	7.242.100.473,57
1.20.1.20.16.00.0001.4110105	PAJAK HOTEL BINTANG SATU	1.671.247.762,00	2.100.012.043,39
1.20.1.20.16.00.0001.4110106	PAJAK HOTEL MELATI	959.714.934,00	1.412.146.239,20
1.20.1.20.16.00.0001.4110107	PAJAK LAIN-LAIN (PEMONDOKAN, PENGINAPAN)	2.521.588.451,00	8.737.691.388,45
1.20.1.20.16.00.0001.41102	Pajak Restoran	43.000.000.000,00	51.081.822.831,24
1.20.1.20.16.00.0001.4110202	PAJAK RESTORAN/RUMAH MAKAN	34.241.836.347,00	41.882.023.491,20
1.20.1.20.16.00.0001.4110203	PAJAK CAFE	3.230.175.949,00	2.991.330.769,50
1.20.1.20.16.00.0001.4110204	PAJAK CATERING	5.527.987.704,00	6.208.468.570,54
1.20.1.20.16.00.0001.41103	Pajak Hiburan	12.000.000.000,00	13.113.221.947,38
1.20.1.20.16.00.0001.4110302	PAJAK TONTONAN FILM/BIOSKOP	6.580.107.694,00	7.046.177.741,00

Lampiran XXII

Laporan PAD Kabupaten Gunungkidul 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 ORGANISASI : 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	PENBELASAN	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.00.00.4.	PENDAPATAN	1.406.352.934.260,72	1.528.025.031.859,85	121.672.097.599,13	8,65	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	69.932.706.160,90	79.999.060.486,38	10.026.354.327,88	14,34	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	35.085.661.738,00	37.544.018.290,00	2.458.356.552,00	7,01	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.	Pajak Hotel	347.290.736,00	377.692.366,00	30.441.628,00	8,77	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.01.	Hotel Bintang Tiga	217.078.338,00	237.889.566,00	20.811.228,00	9,59	Dasar Hukum : Perda No. 3 Tahun 2011 LD Tahun 2011 No. 1 Seri B tentang Pajak Daerah.
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.02.	Loamen/Rumah/Penggunaan/Pewaggrahan/Host el/Rumah, Kos	130.172.400,00	139.802.800,00	9.630.400,00	7,40	Dasar Hukum : Perda No. 3 Tahun 2011 LD Tahun 2011 No. 1 Seri B tentang Pajak Daerah.
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02.	Pajak Restoran	3.575.000.000,00	4.504.005.100,00	929.005.100,00	25,99	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02.02.	Rumah, Melan	375.000.000,00	381.578.736,00	6.578.736,00	1,75	Dasar Hukum : Perda No. 3 Tahun 2011 LD Tahun 2011 No. 1 Seri B tentang Pajak Daerah.
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02.03.	Katering	3.200.000.000,00	4.122.426.362,00	922.426.362,00	28,83	Dasar Hukum : Perda No. 3 Tahun 2011 LD Tahun 2011 No. 1 Seri B tentang Pajak Daerah.
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.	Pajak Hiburan	51.861.000,00	64.432.200,00	12.571.200,00	24,24	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.01.	Pagelaran Kesenian Musik/Tari/Busana	6.000.000,00	4.200.000,00	(1.800.000,00)	(30,00)	Dasar Hukum : Perda No. 3 Tahun 2011 LD Tahun 2011 No. 1 Seri B tentang Pajak Daerah.
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.02.	Restoran	1.875.000,00	1.875.000,00		100,00	Alasan: Berkurangnya event pagelaran kesenian.
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.04.	Belap Kendaraan Bermotor	10.151.000,00	8.655.000,00	(1.496.000,00)	(14,74)	Dasar Hukum : Perda No. 3 Tahun 2011 LD Tahun 2011 No. 1 Seri B tentang Pajak Daerah.
						Alasan: Berkurangnya event belap kendaraan bermotor.

Halaman 71

5.1.1.1.03.0 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Lampiran XXIII

Laporan Perkembangan Pariwisata 2013-2016

a. Kota Yogyakarta

III. 6. Perkembangan Jumlah Pengunjung Daya Tarik Wisata di DIY Tahun 2012-2016

No	OOTW	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016				
		wisman	wisata	wisman	wisata	wisman	wisata	wisman	wisata	wisman	wisata			
1	Kortan Yogyakarta	116.656	870.451	182.722	581.664	214.386	884.436	685.432	117.890	483.703	601.939	113.819	479.222	587.241
2	Taman Sari	44.130	287.353	98.950	252.451	351.411	105.396	393.799	439.395	65.137	394.833	399.970	87.485	426.847
3	Gembira Loka	26.296	1.428.852	1.643.348	15.475	1.532.042	1.547.517	19.330	1.775.938	1.793.466	-	1.824.810	1.637	1.635.774
4	Purabaya	23.938	13.022	36.960	33.026	168.048	191.077	33.310	148.124	191.334	-	-	-	-
5	Musium Plasmu Nutfah	7	10.258	10.265	22	16.291	16.313	11	11.704	11.715	24	11.859	11.363	99
6	Pagelaran Kraton	6.582	266.077	274.659	7.425	250.731	296.156	22.777	314.097	336.874	33.120	1.184.516	1.118.036	31.303
7	Taman Ponor	-	932.703	932.703	189	1.016.932	1.007.131	249	1.010.056	1.010.345	-	948.163	948.163	0
8	Musium Sonobudoyo I	10.852	71.682	83.733	6.217	15.761	21.978	4.265	23.003	27.729	5.479	32.270	37.748	5.539
9	Musium Sesiwatilola Panggar Sosialman	11	10.933	10.364	10	11.280	11.290	19	12.701	12.710	48	20.776	20.776	11
10	Musium Taman Siswa Driewantara Kiri G'ya	12	10.998	11.010	36	11.840	11.879	676	11.838	12.514	-	6.016	6.016	-
11	Musium Sasana Wirwama P. Diponegoro	13	2576	2.589	30	2.088	2.118	60	1.246	1.306	-	3.229	3.229	-
12	Musium Pusat Dharma Wirwama	72	9669	9.641	51	6.269	6.316	62	2.674	2.696	-	6.840	6.840	-
13	Musium Petalangan	77	13.8816	13.823	6	3.028	3.033	6	4.213	4.219	-	5.878	5.878	11
14	Musium Kerata Keraton	415	30.255	30.670	542	32.653	33.197	4.597	30.549	35.145	250	22.349	22.559	1.672
15	Musium Sonobudoyo II (Taman Sonobudoyo)	31	853	-	5.943	9.272	14.615	6.742	12.851	19.939	-	-	-	-
16	Lota Gallery	-	-	-	-	-	2.944	3.289	8.033	-	-	-	-	-
17	Musium Botanike Yogyakarta	3.916	216.858	245.794	5.849	252.973	258.322	6.388	345.118	371.466	6.485	420.601	627.446	7.840
18	Musium Biologi UGM	12	16.716	16.728	13	20.237	20.250	51	32.825	32.876	-	12.230	12.230	23
19	Musium Puro Pekualaman	62	258	300	118	919	1.037	601	3.742	4.343	-	2.877	2.877	-
20	Musium Batik Sultan	178	1.931	2.109	166	1.941	2.107	1.448	2.702	4.145	-	3.022	3.022	-
21	Isana Gedung Agung	28	13.311	13.399	-	16.312	16.312	-	10.022	10.022	-	15.655	15.655	-
22	Musium Raja Mataram	751	26.180	26.921	-	26.883	26.883	-	27.785	27.785	-	39.349	41.383	11
23	Musium Babri	-	7.905	7.300	-	6.698	6.666	-	5.433	5.433	-	5.067	5.067	-
24	Musium Museum Djondolan	-	-	-	942	32.653	33.197	417	-	437	-	357	357	-
25	Musium Sendi	-	-	-	49	1.729	1.728	56	5.300	5.356	-	3.827	3.827	-
26	De Mata Art Museum (PENSJARAN 2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		283.804	3.849.148	4.082.947	306.252	4.348.935	4.653.187	236.197	5.035.155	5.251.352	232.913	5.388.352	5.621.265	349.481
Sumber: Data kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata dari Pengelolan Chyekt Wisata dan Dinas Kebudayaan DIY														

c. Kabupaten Bantul

C. Bantul

No	ODTW	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016		
		wisman	wisnus	Jumlah												
1	Pantai Perang Tritis	-	1.778,179	1.778,179	-	1.874,790	1.874,790	-	2.179,000	2.179,000	-	1.999,870	1.999,870	-	2.229,125	2.229,125
2	Pantai Samas	-	51,900	51,900	-	55,698	55,698	-	78,996	78,996	-	140,850	140,850	-	247,293	247,293
3	Gua Selarong	-	27,974	27,974	-	28,274	28,274	-	37,425	37,425	-	39,925	39,925	-	36,618	36,618
4	Gua Carme	-	20,032	20,032	-	55,924	55,924	-	24,356	24,356	-	13,455	13,455	-	13,520	13,520
5	Makam Imogiri	-	31,230	31,230	-	31,230	31,230	502	7,235	7,637	-	9,810	9,810	-	-	-
6	Pantai Pandansimo	-	129,848	129,848	-	119,693	119,693	-	141,373	141,373	-	143,169	143,169	-	140,050	140,050
7	Pantai Kuwari	-	259,913	259,913	-	135,951	135,951	-	150,980	150,980	-	67,585	67,585	-	49,307	49,307
8	Pantai Goa Camara	-	11,667	11,667	-	75,374	75,374	-	88,309	88,309	-	95,260	95,260	-	84,687	84,687
9	Hutan Pinus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,338	143,338	-	394,799	394,799
10	Kebun Buah Munguran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,004	290,004	-	-	-
11	Museum Wiyem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,914	2,914	-	3,669	3,669
12	Indonesia (PENDATAAN 2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,499	11,499	-	12,994	12,994
13	Budaya (PENDATAAN 2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,878	6,878	-	9,911	9,911
14	Pieret (PENDATAAN 2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,168	3,168	-	4,451	4,451
15	Museum Gunung Pasir (PENDATAAN 2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,050	8,050	-	5,462	5,462
16	Museum Sihanjo (PENDATAAN 2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,050	250,050	-	206,563	206,563
17	Desa Wisata as Kab.Bantul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,333,434	1,333,434	-	1,120,223	1,120,223
	Jumlah	-	2.378,209	2.378,209	-	2.037,874	2.037,874	502	2.709,314	2.709,314	-	4.519,199	4.519,199	-	5.143,093	5.143,093

Sumber: Data kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata dari Pemda Kab/Wata

d. Kabupaten Kulon Progo

No	CODW	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016		
		wisman	wisnus	Jumlah	wisman	wisnus	Jumlah	wisman	wisnus	Jumlah	wisman	wisnus	Jumlah	wisman	wisnus	Jumlah
1	Waduk Sermo	-	20,822	20,822	-	30,643	30,643	-	38,657	38,657	-	81,460	81,460	-	102,238	102,238
2	Pantai Gajah	-	278,519	278,519	-	293,981	293,981	-	339,639	339,639	-	335,635	335,635	-	314,036	314,036
3	Pantai Trik	-	23,076	23,076	-	22,972	22,972	-	33,802	33,802	-	13,911	13,911	-	11,074	11,074
4	Pantai Congot	-	37,544	37,544	-	37,821	37,821	-	56,001	56,001	-	37,633	37,633	-	57,605	57,605
5	Gua Kluendo	-	8,966	8,966	-	7,060	7,060	-	10,943	10,943	-	15,710	15,710	-	14,771	14,771
6	Cianang	-	21,387	21,387	-	22,559	22,559	-	32,418	32,418	-	-	-	-	-	-
7	Suroloyo	-	10,954	10,954	-	24,521	24,521	-	26,814	26,814	-	35,325	35,325	-	24,513	24,513
8	Sandang Sono	-	106,500	106,500	-	108,000	108,000	-	130,000	130,000	-	-	-	-	-	-
9	Jogja Orang Utan Center (YUW)	-	13,088	13,088	-	8,912	8,912	-	9,449	9,449	-	-	-	-	-	-
10	Melam Girigondo	-	3,025	3,025	-	4,839	4,839	-	4,327	4,327	-	-	-	-	-	-
11	Twisman Wisata Ancol	-	-	-	-	9,821	9,821	-	2,857	2,857	-	51	51	-	-	-
12	Wehana Pelangi	-	29,386	29,386	-	31,711	31,711	-	47,210	47,210	-	-	-	-	-	-
13	Melam Nyi Ageng Serang	-	2,166	2,166	-	1,038	1,038	-	2,117	2,117	-	-	-	-	-	-
14	Desa Wisata se Kab Kulonprogo	-	40,401	40,401	-	91,972	91,972	-	173,475	173,475	23	769,847	769,870	6,506	822,657	829,163
	Jumlah	-	595,824	595,824	-	655,850	655,850	-	907,709	907,709	23	1,289,672	1,289,695	6,506	1,346,894	1,353,400

Sumber: Data kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata dari Pemda Kab/Kota

e. Kabupaten Gunungkidul

No	ODTW	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016				
		wisman	jumlah	wisnus	jumlah	wisman	jumlah	wisnus	jumlah	wisman	jumlah			
1	Kawasan Pantai Baron-Pantai Pok Tunggal	-	442,912	548	518,351	518,899	-	1,051,040	-	1,676,359	1,676,359	1,354	1,945,191	1,945,545
2	Pantai Slung	-	34,183	168	52,319	52,487	-	139,963	-	185,160	185,160	383	216,917	217,300
3	Pantai Wedi Ombo	-	35,150	103	44,612	44,715	-	143,122	-	147,725	147,725	-	197,985	197,985
4	Pantai Sedeng	-	24,342	96	29,020	29,116	-	104,200	-	24,080	24,080	-	-	-
5	Pulau Gunders (tahun 2015 disatukan menjadi Kawasan Pantai Baron-Pantai Po Tunggal)	-	108,030	126	149,201	149,127	-	506,277	-	-	-	-	-	-
6	Tejus (tahun 2015 ditetapkan menjadi Kawasan Pantai Baron-Pantai Po Tunggal)	-	179,377	138	229,587	230,125	-	354,645	-	-	-	-	-	-
7	Pantai Ngerenehan	-	34,986	-	41,268	41,268	-	161,917	-	110,945	110,945	-	117,277	117,277
8	Goa Cerme	-	1,800	-	3,000	3,000	-	16,308	-	4,056	4,056	-	6,255	6,255
9	Gunung Gambar	-	1,400	-	372	372	-	3,682	-	3,000	3,000	-	3,719	3,719
10	Desa wisata se Kab Gunung Kidul	2,053	413,632	2,379	756,763	759,142	5,329	1,178,664	5,329	484,374	484,374	2,145	983,510	985,655
11	Watu Lumbung	-	-	-	-	-	-	-	-	3,020	3,020	-	5,154	5,154
	Jumlah	2,053	1,277,012	3,558	1,818,693	1,822,251	5,329	3,679,818	5,329	2,642,759	2,642,759	3,882	3,476,008	3,479,890

Sumber: Data kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata dari Pemda Kab/Kota

Lampiran XXIV

Retribusi Obyek Wisata 2013

V. 1. Umlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata di Kabupaten / Kota Se DIY Tahun 2013

NO	SUMBER	KOTA	SLEMAN	BANTUL	KULONPROGO	GUNUNGKIDUL	PEMDA DIY	JUMLAH
1	Pajak Hotel & Restaurant	87.331.577,240	62.547.222.536,32	4.916.961.951	711.225,429	1.382.653.942	TA	156.889.641.098,32
2	Pajak Tomboan / Hiburan	7.508.687,487	4.910.550.639,96	474.855,491	6.647,500	23.178,000	TA	12.923.919,117,96
3	Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata	TAP	1.128.272.723,00	8.906.211,600	1.563.501,500	6.118.756,600	TA	17.716.742.423,00
4	Retribusi Perijinan Usaha Pariwisata	TAP	TAP	TAP	TAP	TA	TA	0,00
5	Retribusi Penggunaan Aset Milik Pemda (Sewa / Kontrak / Bagi Hasil)	TAP	46.139.695,00	235.785,000	364.642,650	644.268,850	17.876,510	1.308.712.705,00
	TOTAL	94.840.264,727	68.632.185.594,28	14.533.814,042	2.646.017,079	8.168.857,392	17.876,510	188.839.015.344,28

Keterangan:

TAP: Tidak ada Pungutan

TA : Tidak Ada

Lampiran XXV

Retribusi Obyek Wisata 2014

V.1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata di Kabupaten / Kota Se DIY Tahun 2014

NO	SUMBER	KOTA	SLEMAN	BANTUL	KULONPROGO	GUNUNGKIDUL	PEMDA DIY	JUNILAH
1	Pajak Hotel & Restaurant	106.789.831.895	77.779.907.952	5.627.251.051	709.645.778	1.972.501.150		192.879.137.826
2	Pajak Tontonan / Hiburan	9.337.105.000	5.652.846.681	577.695.506	1.720.000	21.278.000		15.611.645.197
3	Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata		985.581.506	9.607.119.500	1.633.898.000	14.989.421.327		27.216.010.527
4	Retribusi Perijinan Usaha Pariwisata	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP
5	Retribusi Pengunaan Aset Milik Pemda (Sewa / Kontrak / Bagi Hasil)		361.892.340	233.946.000	108.852.000	431.054.900	23.016.900	1.146.764.140
	TOTAL	216.146.936.895	84.782.228.457	16.946.022.057	2.544.115.778	17.423.255.377	23.038.900	236.955.897.090

Keterangan:

TAP: Tidak ada Pengisian

TA: Tidak Ada



Graha Pariwisata DIY / Jl. Malioboro No. 56 (0274) 587486

Website: <http://www.visitdiyguy.go.id/> Email: diya@visitdiyguy.go.id

Lampiran XXVI

Retribusi Obyek Wisata 2015

V.1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata di Kabupaten / Kota Se DIY Tahun 2015

NO	SUMBER	KOTA	SLEMAN	BANTUL	KULONPROGO	GUNUNGKIDUL	PEMDA DIY	JUMLAH
1	Pajak Hotel & Restaurant	106,789,851,895	91,434,201,042	6,599,191,906	1,021,300,925	9,073,735,274	TA	208,918,260,442
2	Pajak Tontonan / Hiburan	9,357,105,050	8,688,347,501	531,504,235	42,027,808	53,131,850	TA	18,672,116,225
3	Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata	TA	4,526,405,500	11,146,632,500	2,272,396,000	20,436,975,531	TA	38,382,405,531
4	Retribusi Perijinan Usaha Pariwisata	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP
5	Retribusi Penggunaan Aset Milik Pemda [Sewa / Kontrak / Bagi Hasil]		336,148,777	4,000,000	85,050,000	543,969,900	51,404,440	1,020,573,117
	TOTAL	116,146,956,925	104,985,102,620	18,281,328,042	3,420,774,733	24,107,812,555	51,404,440	266,993,359,315

Keterangan:

TAP: Tidak ada Pungutan

TA: Tidak Ada

Lampiran XXVII
Retribusi Obyek Wisata 2016

V.1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata di Kabupaten / Kota Se DIY Tahun 2016

NO	SUMBER	KOTA	SLEMAN	BANTUL	KULONPROGO	GUNUNGKIDUL	PEMDA DIY	JUMLAH
1	Pajak Hotel & Restaurant	150,950,199,189	118,468,738,360	8,358,234,653	1,384,003,191	4,881,697,466	-	284,042,872,859
2	Pajak Tontonan / Hiburan	11,440,566,732	13,503,081,110	799,304,711	11,739,600	64,432,200	-	25,819,124,353
3	Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata	-	4,450,638,000	12,739,875,250	2,503,958,000	23,383,852,700	-	43,078,343,950
4	Retribusi Perijinan Usaha Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-
5	Retribusi Pengunaan Aset Milik Pemda (Sewa / Kontrak / Bagi Hasil)	-	725,598,458	3,850,000	104,344,000	45,403,200	89,828,720	973,024,378
	TOTAL	162,390,765,921	137,152,075,928	21,901,264,614	4,004,044,791	28,375,385,566	89,828,720	353,913,365,540

Lampiran XXVIII

Surat Izin Dinas Kesbangpol



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 18 Juli 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/7688/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Kepala Dinas Pariwisata DIY
2. Kepala Dinas Kebudayaan DIY
3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset DIY

di TEMPAT

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
Nomor : 220/DEK/10/Div.SDM/VII/2018
Tanggal : 11 Juli 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PENGARUH JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN, RETRIBUSI OBYEK WISATA, PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI YOGYAKARTA" kepada:

Nama : SYARIFAH NAILI RAHMI
NIM : 14312285
No. HP/Identitas : 082136335025/960114380125
Prodi/Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian : Dinas Pariwisata DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset DIY
Waktu Penelitian : 18 Juli 2018 s.d 30 Juli 2018
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia;
3. Yang bersangkutan.

(Lanjutan...)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/8594Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
2. Bupati Bantul
Up. Kepala BAPPEDA Bantul
3. Bupati Sleman
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman

di TEMPAT

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
Nomor : 220/DEK/10/Div.SDM/VII/2018
Tanggal : 11 Juli 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PENGARUH JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN, RETRIBUSI OBYEK WISATA, PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI YOGYAKARTA" kepada:

Nama : SYARIFAH NAILI RAHMI
NIM : 14312285
No.HP/Identitas : 082136335025/960114380125
Prodi/Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian : BKAD Kota Yogyakarta, BKAD Kab. Bantul, BKAD Kab. Sleman
Waktu Penelitian : 20 Agustus 2018 s.d 31 Agustus 2018 (Perpanjangan I)
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran XXIX

Surat Izin Bappeda Kabupaten Bantul



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 2528 / S1 / 2018

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.
- Memperhatikan** :
- Surat dari : Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
Nomor : 074/8594Kesbangpol/2018
Tanggal : 20 Agustus 2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

1. Nama : SYARIFAH NAILI RAHMI
2. NIP/NIM/No.KTP : 3320027001960002
3. No. Telp/ HP : 082136335025

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : PENGARUH JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN, RETRIBUSI OBYEK WISATA, PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI YOGYAKARTA
- b. Lokasi : BKAD Kota Yogyakarta, BKAD Kabupaten Bantul, BKAD Kabupaten Sleman
- c. Waktu : 20 Agustus 2018 s/d 20 Februari 2019
- d. Status izin : Baru
- e. Jumlah anggota : -
- f. Nama Lembaga : Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy (CD)* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin, dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 20 Agustus 2018

A.n Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian Penelitian
dan Pengembangan, b. Kasubbid
Penelitian dan Pengembangan

BAPPEDA
KABUPATEN BANTUL
TRI SUMIATI, SH
NIP. 196806261990032002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Ke..atuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul
4. Dekan Fakultas Ekonomi, UII Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan (Pemohon)

(Lanjutan...)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

PERNYATAAN MENYERAHKAN HASIL

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SYARIFAH NAILI RAHMI -----
NIP/NIM/No.KTP : 3320027001960002 -----
No. HP : 082136335025 -----
Alamat rumah : PECANGGAAN KULON 001/004 PECANGGAAN KULON KECAMATAN
PECANGGAAN KABUPATEN JEPARA -----
Perguruan Tinggi / Lembaga : Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta -----
No. / Tgl. Ijin Penelitian : 070 / Reg / 2528 / S1 / 2018 ----- Tanggal 20 Agustus 2018 -----
Judul Penelitian : PENGARUH JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN, RETRIBUSI OBYEK
WISATA, PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH PROVINSI YOGYAKARTA -----

Dengan ini menyatakan **BERSEDIA** menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian/survey bentuk **hardcopy** (**hardcover**) dan **softcopy** (CD) yang kami lakukan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul cq. Bappeda Kabupaten Bantul.

Bantul, 20 Agustus 2018
Yang Menyatakan

SYARIFAH NAILI RAHMI

THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

Lampiran XXX

Surat Tanda Terima Izin Penelitian Kota Yogyakarta



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Kenari 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 548519, 562835, 515865, 562682
Fax. (0274) 548519
EMAIL : bpkad@jogjakota.go.id;
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

TANDA TERIMA

KANTOR / LEMBAGA : SYARIFAH NAJLI RAHMATI.....
NOMOR : 074/D.504 Kesbanghol / 20 W.....
TANGGAL : 20 - 07 - 20 18.....
PERIHAL : Izin untuk belajar bahasa Inggris,
pembelian barang misal, pengisian botol dan
pembelian, pembelian P.A.D. DIY.
KODE : 993/2639.....

(M)) 20/07/18
Dambay

Kepala

Drs. Kadri Renggono, M.Si
NIP. 19661127 199303 1006



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWA MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

Lampiran XXXI

Kartu Masuk Penelitian Pemda DIY

**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KARTU SURAT MASUK**

REKOMENDASI PENELITIAN Index	Kode 070	Nomor Urut 03333
Isi Ringkas : Rekomendasi Penelitian Dalam rangka Menyusun Skripsi dengan Judul Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata, Pajak Hotel dan Restoran Pendapatan Asli DIY AN SYARIF AH NAILIRAHMI, Prodi Akuntansi FE UII 18 Juli 2018/030 Juli 2018 Dikesbangpoidiy Dan :		
18 Tanggal Surat: 18	014/76888/Ke Nomor Surat: 18	Lampiran :
Pengolah : DINAS PPKA	Tgl diteruskan 2018	Tanda Terima :
Catatan : <i>KASUBK CEMEN</i>	Lembar III	

Lampiran XXXII

Lem

LEMBAR DISPOSISI

INDEKS :	KODE	NO. URUT	
REKOMENDASI PENELITIAN	070	03333	
PERIHAL / ISI RINGKAS :			
Rekomendasi Penelitian Dalam rangka Menyusun Skripsi dengan Judul Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Retribusi Obyek Wisata, pajak Hotel dan Restoran Pendapatan Asli DIY AN SYARIFAH NAILI RAHMI, Prodi Akuntansi FE UII 18 Juli			
ASAL SURAT	TANGGAL	NOMOR	LAMPIRAN
21 Kabid. Angpd DIY	18-07-2018	07476	Angpd/18
DIAJUKAN / DITERUSKAN :		INFORMASI / INSTRUKSI :	
KEPADA : ① Sekretaris ✓ 2. Kabid. Anggaran Pendapatan 3. Kabid. Anggaran Belanja 4. Kabid. Pengelolaan Kas Daerah 5. Kabid. Akuntansi 6. Kabid. Pengelolaan Barang Daerah 7. Kabid. Bina Administrasi Keuangan Daerah 8. Ka. KPPD Kota / Kabupaten		rth. P. Pendi ~ mhn difasilitasi (bukan pajak prar.) 7 18 '18 7	
		TGL. PENYELESAIAN	
		18-7-2018	

bar Disposisi

Lampiran XXXIII

Surat Izin Penelitian Universitas Islam Indonesia



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 883087 - 885376 Fax. : 882589

Nomor : 220/DEK/10/Div.SDM/VII/2018
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Kepada Yth.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Syarifah Naili Rahmi
No. Mahasiswa : 14312285
Jurusan : Akuntansi
Alamat : RT 07 RW 12 Dusun Gendingan, Desa Tirtomartani, kec. Kalasan, Kab. Sleman

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

“ Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Retribusi Objek Wisata, Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Yogyakarta”

Dosen Pembimbing : Sigit Handoyo,, S.E., M.Bus.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut. Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 11 Juli 2018
Dekan

Jaka Sriyana, SE.,M.Si., Ph.D
NIK. : 93 313 0101